



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

2023

LAPORAN KINERJA

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (LKj-OPD)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua

BAPPEDA PROVINSI PAPUA
Kantor Gubernur Papua
Jl. Soa Siu Dok II
Kota Jayapura - Papua
Tahun 2024

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan visi, misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah diharapkan melalui alat yang sudah dipertanggungjawabkan secara periodik.

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Kinerja (LKj) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selama tahun 2023. Capaian kinerja (performance results) tahun 2023 tersebut dibandingkan dengan penetapan kinerja (performance agreement) tahun 2023 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Pemerintah (LKj) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw atas Laporan Kinerja Instansi Kinerja.

Secara umum Bappeda Provinsi Papua telah melaksanakan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara pembangunan di bidang perencanaan yang pada tahun anggaran 2023 pelaksanaan kegiatannya berjalan baik dan cukup berhasil dan telah melaksanakan sejumlah kegiatan rutin kantor, kegiatan bidang dan sekretariat. Kegiatan-kegiatan tersebut dalam rangka pencapaian visi dan misi sebagaimana yang tertuang dalam Renstra tahun 2024-2029.

Metode pengukuran capaian kinerja Bappeda Provinsi Papua tahun 2023 dilakukan berdasarkan analisa hasil kinerja kegiatan dengan membandingkan antara kinerja actual dengan rencana atau target/sasaran. Selanjutnya menginterpretasikan data yang diperoleh kemudian membuat pembobotan keberhasilan pencapaian dengan berpedoman pada program, kebijakan dan tujuan yang telah digariskan dari rincian pengukuran kinerja adalah evaluasi kinerja sasaran, evaluasi kinerja kegiatan dan indikator makro, maka capaian kinerja sasaran rata-rata Bappeda Provinsi Papua pada tahun 2023 secara keseluruhan dapat di kategorikan Sangat Berhasil, karena pencapaiannya 90 – 100%

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanah Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan adanya Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja, Penyusunan Laporan Kinerja merupakan kewajiban bagi seluruh instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Laporan kinerja disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas, penilaian hasil kinerja dan transparansi serta wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 adalah gambaran kinerja dari seluruh unit kerja Bappeda dengan mengevaluasi dan menganalisis kinerja pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan selama tahun 2023. Menindaklanjuti sasaran tahun sebelumnya, rencana kinerja tahun 2023 ditetapkan dalam pencapaian 1 (satu) sasaran strategis dan 6 (enam) indikator kinerja.

Selanjutnya diharapkan laporan ini menjadi dasar evaluasi untuk menciptakan kinerja Bappeda yang lebih baik. Terima kasih disampaikan kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah memberikan masukan saran dan pendapat dalam penyusunan Laporan Kinerja Bappeda Provinsi Papua Tahun 2023 ini.

Jayapura, 29 Januari 2024

KEPALA BAPPEDA PROVINSI PAPUA



**YOHANES WALILO, S.Sos, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19700728 199712 1 001**

DAFTAR ISI

	<i>Hal</i>
IKHTISAR EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1. Latar Belakang	5
1.2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	6
1.3. Struktur Organisasi.....	7
1.4. Maksud dan Tujuan	19
1.5. Sistematika	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	21
2.1. Rencana Strategis Tahun 2019-2023	21
2.2. Tujuan dan Sasaran	25
2.3. Rencana Strategis Bappeda Provinsi Papua	27
2.4. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	29
2.5. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2023	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	37
3.1. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2023	37
3.2. Hasil Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023.....	40
a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	39
b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 dengan 2023	41
c. Perbandingan capaian tahun 2023 dan target Renstra tahun 2019-2023	42
d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan	44

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	47
3.3. Realisasi Anggaran Tahun 2023	48

BAB IV PENUTUP.....	52
----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Laporan Kinerja Program Kegiatan Dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023
2. Rekapitulasi Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan APBD TA 2023
3. Rekapitulasi Realisasi Pelaksanaan APBD TA 2023
4. Perjanjian Kinerja Kepala SKPD Tahun 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah atas Laporan Kinerja Instansi Kinerja, serta dalam rangka mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada tahun anggaran 2023, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Papua menyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023 dan Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) 2024. Laporan ini memuat hasil pengukuran sasaran strategis Bappeda Provinsi Papua melalui indikator kinerja (parameter) yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya

Indikator kinerja sasaran merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan Bappeda Provinsi Papua dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian sasaran tingkat pemerintah Provinsi Papua. Indikator kinerja sasaran menggunakan indikator kinerja Utama yang dipilih dari beberapa output dan outcome dari kegiatan, indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input) yang mengutamakan penggunaan dana APBD Provinsi Papua, indikator keluaran (output) dan indikator hasil (outcome) sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023.

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari pejabat eselon II ke atas untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan padanya berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) yang dirumuskan sebelumnya. Pertanggungjawaban dimaksud disampaikan kepada atasan masing-masing, kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas yang berkewenangan, dan akhirnya kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan serta dilakukan melalui sistem akuntabilitas dan media pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan secara periodik dan melembaga.

Fungsi aparatur dalam setiap organisasi pemerintah dalam mengemban tugas pemerintah dan pembangunan memegang peranan yang sangat penting dan strategis

dalam meningkatkan kinerja organisasi, oleh karena itu peran aparatur harus terus menerus ditingkatkan agar pegawai negeri sipil dan sumber daya yang menentukan benar-benar mampu meningkatkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai abdi negara yang profesional.

Peningkatan kinerja instansi pemerintah dan kemampuan aparat pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang maksimal pada publik maka pengukuran kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen program secara keseluruhan karena kinerja yang dapat diukur akan mendorong kinerja tersebut.

Pengukuran kinerja sebagai implementasi dari pelaksanaan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 pada dasarnya merupakan tatanan, instrumen, metode pertanggung jawaban meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan pelaporan sebagai siklus akuntabilitas kinerja yang tidak terputus sebagai penilaian atas prestasi/ keberhasilan dan kegagalan visi, misi organisasi yang tertuang dalam Renstra SKPD. Metode Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023 dan Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) 2024 Bapepda Provinsi Papua secara teknis mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam mengukur kinerja suatu unit organisasi sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 lebih mendekat kepada sistem Akip setelah melalui perencanaan dalam membandingkan kajian antara perencanaan Realisasi dan Sasaran dengan menggunakan indikator input, output, out come dalam mencapai target indikator pada hasil. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) sebagai informasi atas capaian kinerja instansi atau SKPD.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Papua Nomor 62 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua (Bab II, pasal 2,3, dan 4), Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi

Maksud dibentuknya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam menyelenggarakan fungsi penunjang pemerintahan bidang perencanaan. Sedangkan tujuan dibentuk peraturan Gubernur adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang rasional, proposional, efektif dan efisien yang didasarkan pada asas efisiensi, efektifitas, pembagian habis tugas, tentang

kendali, tata kerja yang jelas dan fleksibilitas antara penyelenggara fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang perencanaan

Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah dan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lainnya yang diberikan Gubernur. Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok sebagaimana pasal 3, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3 Struktur Organisasi

Sesuai dengan Perda No.13 Tahun 2013, tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua dan Peraturan Gubernur Papua Nomor 62 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan yang menjadi kewenangan daerah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Papua Nomor 62 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Program
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - a. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
3. Bidang Perekonomian, membawahi :
 - b. Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, ESDM, Perikanan dan Kelautan
 - c. Sub Bidang Perindustria, Perdagangan dan Pariwisata
 - d. Sub Bidang Dunia Usaha Investasi dan Lembaga Keuangan
4. Bidang Sosial Budaya, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga dan Pemuda
 - b. Sub Bidang Kesehatan, Sosial dan Kependudukan
 - c. Sub Bidang Pemerintahan dan Otonomi Khusus
5. Bidang Fisik dan Prasarana, membawahi :
 - a. Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengairan
 - b. Sub Bidang Perhubungan dan Telekomunikasi
 - c. Sub Bidang Bina Marga dan Cipta Karya
6. Bidang Pengendalian dan Evaluasi, membawahi :
 - a. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi
 - b. Sub Bidang Pengendalian Administrasi Program
 - c. Sub Bidang Pelaporan dan Pembangunan
7. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Kawasan, membawahi :
 - a. Sub Bidang Perencanaan Kawasan
 - b. Sub Bidang Pengembangan Kawasan
 - c. Sub Bidang Kawasan Strategi dan Khusus
8. Unit Pelaksanaan Teknis Badan (UPTB); dan
9. Kelompok Jabatan Fungsional

Selanjutnya, tugas pokok pada Badan Perencanaan Daerah Provinsi Papua diuraikan sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Untuk melaksanakan tugas pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai Fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis perencanaan Pembangunan Daerah dan

Pengembangan Wilayah

- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis Perencana Pembangunan Daerah dan Pengembangan Wilayah
- c. Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis perencana Daerah dan Pengembangan Wilayah; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat :

Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan serta Perlengkapan.

Fungsi :

- a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan
- b. Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu.
- c. Penetapan rumusan kebijakan penyusunan rencana strategis Badan.
- d. Penetapan rumusan kebijakan pelayanan administrasi Badan.
- e. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan.
- f. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat.
- g. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan Penetapan rumusan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan.
- h. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas badan.
- i. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Badan.
- j. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas badan.
- k. Pelaporan dan Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan.

- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- m. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan.

Sekretariat, membawahi :

a. Sub Bagian Program;

Sub Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas, pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program anggaran Badan. Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Sub Bagian Program mempunyai fungsi :

1. Melakukan penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan rencana kegiatan Sub Bagian Program;
2. Melakukan pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan Badan, meliputi rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan Penetapan Kinerja (PK);
3. Pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas;
4. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Badan;
5. Melakukan pengumpulan dan pengadministrasian usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dari unit-unit kerja di lingkungan Badan;
6. Melakukan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan berdasarkan usulan unit-unit kerja dan hasil pembahasan internal Badan;
7. Melakukan pengurusan administrasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan dengan mengkoordinasikannya pada pihak-pihak terkait;
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya
9. Melakukan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan berdasarkan usulan unit-unit kerja dan pembahasan internal Badan;
10. Melakukan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap realisasi atau pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
11. Melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan Badan untuk penyiapan bahan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Badan dan laporan kedinasan lainnya;

12. Melakukan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan;
13. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian; dan
14. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
15. Pelaksanaan Penyusunan rencana strategis Badan.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan ketatausahaan (surat menyurat/naskah dinas), rumah tangga, perpustakaan, keprotokolan, kehumasan, kepegawaian, serta urusan umum lainnya Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

1. Melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan (surat menyurat/ naskah dinas);
3. Melakukan pengelolaan urusan rumah tangga, perpustakaan, keprotokolan, dan kehumasan Badan;
4. Melakukan pengelolaan urusan pembinaan dan pengembangan pegawai Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Melakukan pelayanan administrasi kepegawaian Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Melakukan fasilitasi pemrosesan penetapan angka kredit jabatan fungsional;
7. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian; dan
8. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan dan pelayanan di bidang keuangan Badan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan Badan.
2. Pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran pendapatan, belanja dan

pembiayaan.

3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja.
4. Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan pegawai negeri sipil.
5. Perencanaan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program administrasi pengelolaan keuangan.
6. Pelaksanaan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Badan.
7. Pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan pembinaan administrasi akuntansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan.
8. Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja.
9. Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan.
10. Pelaksanaan penyusunan rencana penyediaan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan.
11. Pelaksanaan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas Badan.
12. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
13. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
Pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi dan pertanggung-jawaban pengelolaan keuangan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

3. Bidang Perekonomian

Bidang perekonomian mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan pembangunan dibidang perekonomian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bidang Perekonomian mempunyai fungsi :

- Mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan pembangunan di bidang pertanian, kehutanan, energy dan sumberdaya mineral, bidang perikanan dan kelautan, perindustrian, bidang perdagangan, pariwisata, investasi dan bidang keuangan;
- Mengkoordinasikan perencanaan strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan

- Pembinaan teknis substantif penyusunan strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan pembangunan di bidang pertanian, kehutanan, energy dan sumberdaya mineral, bidang perikanan dan kelautan, bidang perindustrian, perdagangan, bidang pariwisata, bidang investasi dan bidang keuangan;
- Mengkoordinasikan perencanaan strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan
- Pembinaan teknis substantive penyusunan strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan;
- Pengkoordinasian, pengendalian kesesuaian antar indicator kinerja program dengan tolak ukur kinerja out put dan/ hasil kegiatan pada Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan;
- Pengkoordinasian pengendalian dan evaluasi pencapaian kinerja bidang perekonomian serta penentuan peringkat badan;
- Pengkoordinasian penghitungan rencana alokasi anggaran badan;
- Pengkoordinasian penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
- Pengkoordinasian penyusunan Penyelenggaraan penataan ruang, Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi dan
- Penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi bidang ekonomi

Bidang perekonomian membawahi 3 (tiga) Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, ESDM, Perikanan dan Kelautan, Perindustrian, Perdagangan, Koperasidan Pariwisata dan Dunia usaha, Investasi dan Lembaga Keuangan, masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

4. Bidang Sosial Budaya

Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan pembangunan di bidang sosial budaya

Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi :

- Pengkoordinasian pelaksanaan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, kebudayaan, olahraga dan pemuda, kesehatan, sosial dan kependudukan serta pemerintahan, dan otonomi khusus
- Pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) badan;
- Pembinaan teknis substantive penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) badan;;
- Pengkoordinasian dan pengendalian kesesuaian antara indikator kinerja program dengan tolok ukur kinerja output dan/hasil kegiatan pada rencana kerja (Renja dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) badan;
- Pengkoordinasian pengendalian dan evaluasi pencapaian kinerja bidang sosial budaya serta penentuan peringkat badan;
- Penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi bidang sosial budaya
- Pengkoordinasian Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

Bidang sosial budaya membawahi 3 (tiga) sub bidang Pendidikan, kebudayaan, olahraga dan pemuda; Kesehatan, Sosial dan Kependudukan; dan Pemerintahan, Otonomi Khusus dan Kerjasama Mitra Pembangunan. Masing-masing sub bidang dipimpin oleh kepala sub bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawaban kepada kepala bidang.

5. Bidang Fisik dan Prasarana

Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai Tugas mengkoordinasikan perencanaan pembangunan di bidang fisik dan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi :

- Mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan di bidang sumber daya alam, lingkungan hidup, pengairan, perhubungan, telekomunikasi, bina marga dan cipta karya.
- Pengkoordinasian penyusunan Rencana strategis (Renstra), Rencana kerja (Renja), dan rencana kerja dan Anggaran (RKA) Badan;

- Pembinaan teknis substansif Penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan;
- Mengkoordinasikan pengendalian kesesuaian antara indikator kinerja program dengan tolok ukur kinerja output dan/atau hasil kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan;
- Pengkoordinasian pengendalian dan evaluasi pencapaian kinerja bidang social budaya serta penentuan peringkat Badan;
- Pengkoordinasi penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- Pengkordinasian penyusunan penyelenggaraan penataan ruang, penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); dan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); dan
- Penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bidang Fisik dan Prasarana.

Bidang Fisik dan Prasarana membawahi tiga sub bidang yaitu Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Pengairan, dan Sub bidang perhubungan, Telekomunikasi, Bina Marga, dan Ciptakarya.

6. Bidang Pengendalian dan Evaluasi

Bidang Pengendalian mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan, melaksanakan pengendalian administrasi perencanaan dan membuat laporan.

- Menyusun rencana kegiatan, melaksanakan pengendalian administrasi program.
- Menyusun rencana kegiatan, melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan.
- Menyusun rencana kegiatan, melaksanakan pelaporan.
- Melaksanakan kegiatan lain yang diperintahkan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas.

Bidang Pengendalian dan Evaluasi membawahi tiga sub bidang sub bidang yaitu Sub Bidang Pengendalian Administrasi Program, Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi dan Sub Bidang Pelaporan Pembangunan

7. Bidang Pengembangan Wilayah Dan Tata Ruang

Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang mempunyai tugas, melaksanakan perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan daerah lingkup

Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang yang meliputi pengembangan wilayah, Tata Ruang, Kawasan Strategis dan Kawasan Khusus. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang pengembangan wilayah dan tata ruang, mempunyai fungsi:

- pelaksanaan inventarisasi permasalahan lingkup Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang yang meliputi pengembangan wilayah, Tata Ruang, Kawasan Strategis dan Kawasan Khusus;
- Pelaksanaan penyusunan kajian kebijakan lingkup Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang yang meliputi pengembangan wilayah, Tata Ruang, Kawasan Strategis dan Kawasan Khusus;
- pelaksanaan penyusunan perencanaan di bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang yang meliputi pengembangan wilayah, Tata Ruang, Kawasan Strategis dan Kawasan Khusus;
- pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan mensinergikan rencana program pembangunan bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang yang meliputi pengembangan wilayah, Tata Ruang, Kawasan Strategis dan Kawasan Khusus;
- pelaksanaan koordinasi kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan bidang pengembangan wilayah dan tata ruang;
- pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda.

Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Pertanian; Sub bidang Pengembangan Wilayah dan Sub bidang Kawasan Strategis dan Kawasan Khusus yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

8. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)

Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. UPTB dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Badan.

UPTB – Pusdalibang

Pusat Data dan Analisa Pembangunan Papua mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tugas teknis badan di bidang pengumpulan, pengolahan dan analisa data pembangunan dan pelayanan informasi pembangunan daerah.

Fungsi Pusat Data dan Analisa Pembangunan Papua, sebagai berikut :

- Perumusan kebijakan pengkajian bahan petunjuk teknis pengumpulan dan pengolahan data pembangunan serta pelayanan informasi pembangunan daerah.
- Penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan dan analisa data spasial dan aspasial pembangunan daerah serta pelayanan informasi publik.
- Penyelenggaraan penyusunan standar pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah.
- Penyelenggaraan pelayanan data dan informasi pembangunan daerah.
- Pengelolaan urusan ketatausahaan.

UPTB Data terdiri dari 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha, dan 3 (tiga) Seksi terdiri dari Seksi Pendataan dan Analisa Data Pembangunan; Seksi Pelayanan Informasi dan Komunikasi; Kepala sub bagian Tata usaha

Sub Bagian dan masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTB-Pusdalisbang.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis pada bidangnya masing-masing pada Bappeda. Kelompok jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga profesional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepala Badan

1.4 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (Lkj) ini adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019 - 2023.

Maksud dari Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Bappeda Tahun 2023 adalah untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023 adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan harus dicapai sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Bappeda untuk meningkatkan kinerjanya.

1.5 Sistematika

Pada dasarnya Laporan Kinerja (LKj) ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Bappeda selama Tahun 2023. Capaian kinerja Tahun 2023 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja tahun 2023

Sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja dimasa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKj) Bappeda Tahun 2023 berpedoman pada peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta struktur organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023

Pada bab ini menjelaskan Capaian Kinerja Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua untuk setiap capaian kinerja sasaran yang diukur dengan Indikator Kinerja Utama dan Realisasi kinerja tahun 2023, dengan cara membandingkan antara kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dan tahun 2022

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis Tahun 2019 – 2023

Dalam rangka mewujudkan visi Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yang Berkeadilan maka pelaksanaan pembangunan akan dilakukan secara simultan dengan tahapan-tahapan yang jelas dan sistematis, memperhatikan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan pembangunan wilayah, memperhatikan dan menghormati nilai-nilai serta hak-hak adat masyarakat asli Papua. Sumberdaya alam Tanah Papua yang berlimpah harus dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkesinambungan dengan memperhitungkan kebutuhan dan kesejahteraan generasi yang akan datang. Sumberdaya yang dapat diperbaharui dikelola dengan memperhatikan kelangsungan fungsi-fungsi ekologis sehingga tetap lestari dan produktif, sedangkan sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui akan dimanfaatkan dengan memperhatikan kebutuhan generasi yang akan datang. Sehubungan dengan itu maka untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan lima tahun ke depan dalam rangka memantapkan kualitas dan daya saing SDM dengan masyarakat yang terjamin rasa aman, tenang dan damai disertai dengan kehidupan yang demokratis melalui tata kelola pemerintahan yang baik serta didukung oleh sarana dan prasarana fisik kewilayahan yang mampu membuka akses ekonomi dan menerobos keterisolasian sebagai upaya untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat asli Papua maka akan diterapkan strategi dan arah kebijakan pembangunan sebagai berikut

Strategi pembangunan daerah Provinsi Papua periode terakhir tahun 2019-2023 didasarkan pada suatu rangkaian intervensi kebijakan (strategi) yang mengarah pada pencapaian kondisi Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera Berkeadilan dengan didukung oleh 5 misi pembangunan, 3 orientasi pembangunan, 4 pendekatan pembangunan, 5 prinsip dasar pembangunan dan 3 nilai dasar pembangunan.

A. VISI

Provinsi Papua memiliki modal dan asset yang sangat besar, baik Aset sumber daya alam, letak geografis yang strategis, struktur demografis penduduk, sumber daya

kultural yang beragam dan kuat. Kita mampu bangkit dan mandiri mengubah tantangan pembangunan menjadi peluang dan kesempatan. Kita juga mempunyai lahan yang luas dan subur yang bisa ditanami oleh berbagai komoditi pangan dan pertanian. Masyarakat Papua memiliki potensi tinggi di berbagai bidang, kesenian dan budaya, dan olah raga serta kreativitas. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan yang telah menuai beragam hasil pada periode 2019-2023, harus terus dipertahankan dan dikembangkan. Capaian dan prestasi pembangunan di tahun 2019-2023, pada hakekatnya adalah salah satu modal dasar ---main capital--- yang harus dilanjutkan untuk meraih capaian dan prestasi pembangunan yang lebih baik lagi, di lima tahun yang akan datang. Pada periode 2019-2023 akan terus dan konsisten berfokus pada meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua, membangun keadilan, penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, menjaga kesatuan Negara Republik Indonesia. Memperhatikan uraian di atas dan mencermati tantangan jauh kedepan yang masih harus dihadapi, maka Visi Provinsi Papua tahun 2024-2029, adalah :

“ Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yang Berkeadilan “

Jika memperhatikan pernyataan visi diatas, maka maka Kebangkitan, Kemandirian dan Kesejahteraan masyarakat Papua sebagai cita-cita bersama akan dapat terwujud secara hakiki jika dalam pelaksanaan pembangunan menjawab rasa Keadilan bagi seluruh masyarakat di Provinsi Papua

Penjelasan masing-masing elemen visi diatas adalah sebagai berikut:

PAPUA BANGKIT

Terwujudnya Masyarakat Papua yang berkemauan dan bertekad tinggi sebagai kesadaran kontemplatif kolektif untuk melepaskan diri dari label ketertinggalan dan kemiskinan untuk mencapai derajat kualitas hidup yang setinggi-tingginya, sehingga mampu berdiri tegak dengan harkat dan martabat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa menghilangkan identitas diri dan kekhususan ke-Papua-an. Kebangkitan ini terjadi dilevel individu, keluarga, komunitas, maupun regional. Identitas diri orang Papua diakui dan dihormati dalam berbagai level dan bidang pembangunan. Dimana Orang Papua mampu mengaktualisasikan diri dan mengambil

peran diberbagai bidang pembangunan. Papua Bangkit dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang semakin baik..

PAPUA MANDIRI

Terwujudnya kondisi Masyarakat Papua mampu mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri untuk mewujudkan kemajuan ekonomi. Dengan didukung Generasi baru Papua yang memiliki jiwa kewirausahaan (Entrepreneurship) serta ekonomi kampung tumbuh dan berkembang. Perwujudan Papua Mandiri dilakukan dengan mendorong tumbuhnya berbagai sektor unggulan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, dan pariwisata harus dikembangkan sehingga memberi nilai tambah dalam pembangunan dan memastikan tersedianya lapangan kerja, serta didukung pengembangan industri pengolahan yang berbasis keunggulan potensi daerah dan industri ramah lingkungan. Papua Mandiri dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi Papua pada sektor dan subsektor unggulan yang semakin baik.

PAPUA SEJAHTERA

Secara sederhana, sejahtera dipahami sebagai tidak kekurangan sesuatu apapun, perasaan aman sentosa, makmur dan selamat atau terlepas dari segala macam gangguan. Dengan pendekatan yang lain, sejahtera juga dapat dikaitkan dengan meningkatnya kualitas hidup masyarakat papua yang setinggi-tingginya dengan tercermin dari kenyamanan masyarakat papua dalam menjalani kehidupan atau menikmati hasil pembangunannya. Di sini, kesejahteraan dikaitkan konsep lahiriah, tapi juga menjangkau segi batiniah. Kesejahteraan juga bermakna kemampuan sumber daya alam Papua yang kaya dapat memberikan manfaat secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam konteks makro, pembangunan daerah juga dimaknai sebagai upaya mencapai kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir bathin, yang memungkinkan bagi setiap Masyarakat Papua untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri,

keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak azasi serta kewajiban manusia.

PAPUA BERKEADILAN

Terwujudnya Keadilan adalah semua Masyarakat Papua tanpa terkecuali dapat memenuhi hak-hak dasarnya di bidang sosial, ekonomi dan budaya terutama pangan, sandang dan papan secara merata, serta memiliki rasa aman dan kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah sehingga menikmati kehidupan yang lebih bermutu dan maju serta memiliki pilihan yang luas dalam seluruh kehidupannya. Sikap mental dan perilaku adil, menjunjung tinggi kesetaraan dan kebersamaan, didukung moral dan budaya gotong royong, saling menghormati dan menunjung tinggi nilai luhur kemanusiaan, mempertahankan eksistensi dan jati diri orang asli Papua sebagai kebanggaan sudah terbentuk dan tertanam di dalam setiap individu orang asli Papua. Pembangunan yang adil dan merata, dengan partisipasi aktif adat dan agama serta seluruh komponen masyarakat, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh Masyarakat khususnya Orang Asli Papua.

B. MISI

Misi pembangunan 2019-2023 merupakan rumusan dari usaha-usaha yang diperlukan untuk mencapai visi, namun tidak dapat terlepas dari kondisi dan tantangan lingkungan global dan domestik pada kurun waktu 2019-2023 yang mempengaruhinya. Misi ini juga diarahkan untuk mewujudkan visi Jangka Panjang Daerah yakni Papua Mandiri Secara Sosial, Budaya, Ekonomi dan Politik. Usaha-usaha Perwujudan visi akan dijabarkan dalam misi, sebagai berikut: Penjelasan masing-masing misi :

1. Memantapkan Kualitas dan Daya Saing SDM
2. Memantapkan Rasa Aman, Tenram dan Damai serta Kehidupan Demokrasi memperkuat Bingkai NKRI
3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
4. Penguatan dan Percepatan Perekonomian Daerah sesuai Potensi Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah berbasis Kultural secara Berkelanjutan
5. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Tertentu

2.2. Tujuan dan Sasaran

Penetapan Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah dan perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome dan impact program-program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategis dan arah kebijakan

Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategis dan arah kebijakan sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Visi, Misi, tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Papua Tahun 2019-2023

Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 1 Memantapkan Kualitas dan Daya Saing SDM	Meningkatkan Kualitas SDM yang berdaya saing	<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan Aksesibilitas, Mutu dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pendidikan- Meningkatkan Budaya Baca pada Masyarakat- Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat- Sukses penyelenggaraan PON dan prestasi olahraga- Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah- Meningkatkan ketersediaan pangan yang berkelanjutan- Meningkatkan ketersediaan pangan yang berkelanjutan- Terwujudnya internalisasi nilai adat dan budaya asli Tanah Papua dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat
Misi 2 Memantapkan Rasa Aman, Tenram dan Damai serta Kehidupan Demokrasi memperkuat Bingkai	Meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban yang berbasis pada kohesivitas sosial dan harmonisasi	<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan suasana tertib, aman dan kepastian hukum- Meningkatkan Keharmonisan dan kohesifitas masyarakat- Meningkatkan penegakan HAM

Misi	Tujuan	Sasaran
NKRI	keberagaman potensi kehidupan masyarakat Papua	- Meningkatnya Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi
Misi 3 Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua - Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik - Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan daerah - Meningkatnya sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah
Misi 4 Penguatan dan Percepatan Perekonomian Daerah sesuai Potensi Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah berbasis Kultural dan Berkelanjutan	<p>Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan</p> <p>Mewujudkan percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur daerah guna menopang pengembangan wilayah serta akses pada layanan dasar dan pasar</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pendayagunaan potensi sumber daya alam untuk penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas - Mengoptimalkan peranan sektor pertambangan dalam mengatasi ketimpangan pendapatan - Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan aksi mitigasi perubahan iklim - Meningkatnya pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan - Membangun struktur perekonomian yang kokoh berbasis pada penciptaan nilai tambah yang optimal terutama pada sektor-sektor industri manufaktur, jasa, dan ekonomi kreatif - Meningkatnya pembangunan ekonomi maritim dan kelautan yang berbasis pada pendayagunaan potensi sumberdaya secara berkelanjutan - Meningkatnya daya saing tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja - Meningkatnya daya saing dan realisasi investasi pada sektorsektor andalan daerah - Meningkatnya akses transportasi berbasis antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh wilayah - Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten - Meningkatnya Ketersediaan sistem pengairan yang mendukung produktivitas wilayah - Meningkatnya Pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman - Meningkatnya ketersediaan energi murah dan energi baru terbarukan - Meningkatnya jangkauan pelayanan sistem komunikasi dan Informasi antar wilayah
Misi 5 Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Tertentu	Meningkatkan pemerataan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kualitas pembangunan berbasis kampung - Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi OAP - Meningkatnya percepatan pembangunan

Misi	Tujuan	Sasaran
		wilayah perbatasan - Meningkatnya pemberdayaan terhadap KAT dan bantuan sosial PMKS - Meningkatnya kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana - Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah dan Upaya Perlindungan anak

2.3. Rencana Strategis Bappeda Provinsi Papua

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Bappeda selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Bappeda bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Bappeda. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Bappeda mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi. Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Bappeda untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Provinsi Papua. Dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran tersebut diatas, maka untuk mencapainya telah dipilih beberapa strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan perencanaan dan pengendalian bidang ekonomi, arah kebijakannya :
Meningkatkan kualitas perencanaan bidang ekonomi; Meningkatkan pengendalian pelaksanaan program bidang ekonomi
2. Peningkatan perencanaan dan pengendalian bidang fisik, arah kebijakannya :
Meningkatkan kualitas perencanaan bidang fisik; Meningkatkan pengendalian pelaksanaan program bidang fisik
3. Peningkatan perencanaan dan pengendalian bidang sosial, arah kebijakannya :
Meningkatkan kualitas perencanaan bidang sosial; Meningkatkan pengendalian pelaksanaan program sosial

4. Peningkatan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, arah kebijakannya : Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah; Meningkatkan pengendalian pelaksanaan program pembangunan daerah; Meningkatkan kualitas pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah
5. Peningkatan perencanaan dan pengembangan kawasan, arah kebijakannya Meningkatkan perencanaan pengembangan kawasan; Meningkatkan pengendalian pelaksanaan program penataan ruang

Tujuan jangka menengah Bappeda Provinsi Papua sesuai dengan Misi RPJMD Provinsi Papua 2019-2023, yakni misi ke-3 “Penguatan Tata Kelola Pemerintahan” adalah Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah”, sedangkan Sasaran jangka menengah Bappeda Provinsi Papua sesuai dengan Tujuan Misi ke tiga RPJMD Provinsi Papua 2019-2023, yakni “Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan daerah”

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Provinsi Papua

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE				
				2019	2020	2021	2022	2023
MISI 3 : PENGUTAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN								
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan daerah	Tingkat konsistensi RKPD terhadap RPJMD	80%	85%	90%	95%	100%
			Penjabaran konsistensi Program RKPD kedalam APBD	80%	85%	90%	95%	100%
			Persentase indikator kinerja sasaran daerah dalam RPJMD yang mencapai target	30 %	40 %	50 %	70 %	85 %
			Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang ekonomi	25%	35%	50%	70%	100%
			Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang sosbud	25%	35%	50%	70%	100%
			Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang fispra	25%	35%	50%	70%	100%
		Meningkanya Kualitas Penyediaan Data Pembangunan	Cakupan ketersediaan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	80%	85%	90 %	95 %	100%

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE				
				2019	2020	2021	2022	2023
		Daerah	Prosentase SKPD dalam	80%	80%	85%	90%	95%
		Meningkatnya Pengendalian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyerapan dan Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Evaluasi RPJMD Kabupaten/Kota se Papua	100%	100%	100%	100%	100%
			Cakupan hasil kajian yang dijadikan sebagai pengambilan keputusan kebijakan ekonomi	85%	85%	90%	90%	90%

2.4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang akan ducapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan, sementara infikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 5 (lima) indikator, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (Formulasi Pengukuran, Tipe Perhitungan, Sumber data Alasan)
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA - Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA - Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA - Penjabaran konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD - Penjabaran konsistensi Program RKPD kedalam APBD 	<p>Ada/Tidak</p> <p>Ada/Tidak</p> <p>Ada/Tidak</p> <p>$\frac{\text{Jumlah program RKPD Tahun berkenan}}{\text{Jumlah Program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenan}} \times 100\%$</p> <p>$\frac{\text{Jumlah program APBD Tahun berkenan sesuai RKPD}}{\text{Jumlah Program RKPD yang harus dilaksanakan tahun berkenan}} \times 100\%$</p>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (Formulasi Pengukuran, Tipe Perhitungan, Sumber data Alasan)
2.	Meningkanya Kualitas Penyediaan Data Pembangunan Daerah	- Ketersediaan data pembangunan daerah	
3.	Meningkatnya Pengendalian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah	- Prosentase SKPD dalam Penyerapan dan Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan	
4.	Implementasi Tata Ruang Secara Konsisten	- Tersedianya Dokumen Perencanaan RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA - Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW	Ada/Tidak $\frac{\text{Kesesuaian Program/kegiatan pembangunan terhadap pola dan struktur ruang}}{\text{Dokumen RTRW}} \times 100\%$
5.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Daya saing daerah	- Pertumbuhan Ekonomi (Pertumbuhan PDRB) - Laju Inflasi - PDRB Per kapital	$\frac{\text{PDRB}(t+1) - \text{PDRB}(t)}{\text{PDRB}(t)} \times 100\%$ Dimana : t+1 = tahun pengamatan PDRB t = tahun pengamatan PDRB sebelumnya $[\{ (1 + \Delta \text{Inf}1)(1 + \Delta \text{Inf}2)(1 + \Delta \text{Inf}t) \}^{1/t}] - 1$ Dimana : ΔInf = perubahan inflasi dari nilai tahun sebelumnya t = adalah periode pengamatan perubahan nilai inflasi. $\frac{\text{PDRB}}{\text{Penduduk Pertengahan tahun}}$

2.5. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2023

Rencana Kerja atau Renja Bappeda adalah dokumen perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Renja Bappeda disusun berdasarkan amanat UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Acuan Renja Bappeda Tahun 2023 adalah Rencana Strategis Bappeda Tahun 2019-2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Program dan kegiatan dijabarkan dalam matrik yang meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan sumber dana. Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, Rencana Kerja Bappeda Tahun 2023 merupakan :

1. Pedoman bagi Bappeda dalam pelaksanaan program tahun 2023
2. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan

Tujuan dari Rencana Kerja Bappeda Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan Rencana Kerja Strategis Tahun 2019-2023;
2. Merumuskan program-program prioritas sebagai tidak lanjut dari permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan yang akan terjadi pada tahun mendatang;
3. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
4. Menjamin tercapainya pemanfaatan sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan

2.6. Perjanjian Kinerja Bappeda

Perjanjian kinerja merupakan salah satu tahapan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk mewujudkan komitmen dan kesepakatan antara Gubernur sebagai pemberi amanah dan pimpinan perangkat daerah sebagai penerima amanah atas kinerja tertentu berdasarkan perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja tersebut mencantumkan indikator kinerja dan target kinerja dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan, yang merupakan bagian dari penyelenggaraan system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)

Perjanjian Kinerja Bappeda Provinsi Papua tahun 2023 mengacu pada Renstra Bappeda Provinsi Papua Tahun 2019 - 2023. Rencana Kinerja tahunan (RKT) tahun 2023, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 serta perubahannya. Adapun perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebelum Perubahan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Kepala Bappeda
Provinsi Papua Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Targ et	Program	Anggaran	Rencana Aksi
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program, serta kegiatan Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsisten Program RPJMD kedalam RKPD	95%	Program Perencanaan pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	4,723,136,582	Triwulan I-IV
			95%	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	12,674,792,895	Triwulan I-IV
		Penjabaran Konsisten Program RPJMD kedalam RKPD	95%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	295,875,000	Triwulan I-IV
2	Meningkanya Kualitas Penyediaan Data Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan Data Pembangunan Daerah	95%	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2,999,999,796	Triwulan I-IV
3	Meningkatnya Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Prosentase SKPD dalam Penyerapan dan Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan	95%	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	3,499,883,095	Triwulan I-IV
4	Inplementasi Tata Ruang scara Konsisten	Presentasi Pemanfaatan Ruang yang Sesuai Dengan PERDA RTRW	75%	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	699,999,733	Triwulan I-IV
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Predikat Evaluasi Inplementasi SAKIP Perangkat Daerah		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	785.000.000	Triwulan I-IV
Total Anggaran Indikator Sasaran Strategis					25,678.687,101	

Total Anggaran untuk keseluruhan program baik Program indikator Kinerja Utama (IKU) dan Program Pendukung (Rutin) adalah :

No	Program	Anggaran	Rencana Aksi
A.	Program Indikator Kinerja Utama (IKU)	25.678.687.101	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	20.037.598.184	Triwulan I - IV
2.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.000.000.000	Triwulan I - IV
B.	Total Anggaran Program Pendukung dan Program IKU	48.716.285.285	

	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
A.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rp 699,999,733	
I.	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rincian Tata Ruang Provinsi	Rp 699,999,733	
1.	Pelaksanaan Persetujuan Subtansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	Rp 699,999,733	DBH
B.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Rp 21,118,473,184	
I.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 1,080,875,000	
2.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 100,000,000	DBH
3.	koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 50,000,000	DBH
4.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 45,875,000	DBH
5.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 50,000,000	DBH
6.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp 50,000,000	DBH
7.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Perangkat Daerah	Rp 107,500,000	DBH
8.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 677,500,000	DBH
II.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 16,401,840,984	
9.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 15,716,290,984	DBH
10.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 155,550,000	DBH
11.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 130,000,000	
12.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 100,000,000	DBH
13.	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksa	Rp 100,000,000	DBH
14.	koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Rp 100,000,000	DBH
15.	Penyusunan laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp 100,000,000	DBH
III.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 241,506,800	
16.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 50,000,000	DBH
17.	Sosialisai Peraturan Perundang-Undangan	Rp 191,506,800	DBH
IV.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 2,936,300,000	
18.	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Rp 153,000,000	DBH
19.	Penyediaan Bahan logistik Kantor	Rp 120,000,000	DBH

	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
20	Penyediaan Bahan Cetak dan Pengandaan	Rp	300,000,000	DBH
21	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp	460,000,000	DBH
22	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Rp	1,255,000,000	DBH
23	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp	648,300,000	DBH
V.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	343,400,400	
24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	73,200,000	DBH
25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	102,000,000	DBH
26	Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor	Rp	168,200,400	DBH
VI.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	114,550,000	
27	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	114,550,000	DBH
C.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIANDAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rp	11,223,019,473	
I.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rp	4,723,136,582	
28	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Rp	442,000,000	DBH
29	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Rp	527,101,582	DBH
30	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/lintas SKPD	Rp	140,800,000	DBH
31	Pelaksanaan Musrembang Provinsi	Rp	2,848,360,000	DBH
32	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Rp	764,875,000	DBH
II.	Analisis Data dan Informasi Pemerintaha Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	2,999,999,796	
33	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	1,387,566,566	DBH
34	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	610,469,910	DBH
35	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informas Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten/Kota	Rp	1,001,963,320	DBH
III.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	3,499,883,095	
36	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Rp	999,997,040	DBH
37	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Rp	499,990,000	DBH
38	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp	1,499,966,055	DBH
39	fasilitasi /Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	499,930,000	DBH
D.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp	12,674,792,895	
I.	Koordiansi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rp	3,499,999,600	
40	koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp	700,000,000	DBH
41	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Rp	999,999,800	DBH

	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
42	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Rp	500,000,000	DBH
43	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Rp	500,000,000	DBH
44	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp	299,999,800	DBH
45	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp	500,000,000	DBH
II.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Rp	3,399,999,900	
46	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp	460,000,000	DBH
47	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Rp	575,000,000	DBH
48	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Rp	500,000,000	DBH
49	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Rp	340,000,000	DBH
50	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJP,RPJMD, dan RKPD)	Rp	425,000,000	DBH
51	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Rp	350,000,000	DBH
52	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Rp	250,000,000	DBH
53	koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Rp	499,999,900	DBH
III.	Koordinasi Perencanaan Bidang infrastruktur dan kewilayahan	Rp	5,774,793,395	
54	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp	804,990,675	DBH
55	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Insfrastruktur	Rp	839,999,685	DBH
56	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembanguana Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Rp	999,999,325	DBH
57	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Rp	829,999,515	DBH
58	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJP, RPJMD, dan RKPD)	Rp	799,804,705	DBH
59	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang Kewilayahan	Rp	299,999,735	DBH

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
60 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	Rp 599,999,855	DBH
61 koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah	Rp 599,999,900	DBH
D. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rp 3,000,000,000	
I. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Pengaturan	Rp 900,000,000	
62 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Rp 900,000,000	DBH
II. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Rp 700,000,000	
63 Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Rp 700,000,000	DBH
III. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Rp 700,000,000	
64 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Rp 700,000,000	DBH
IV. Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Rp 700,000,000	
65 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Bersifat Inovasi	Rp 700,000,000	DBH
Jumlah Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Utama/Rutin)	Rp. 48.716.285.285	

Jumlah anggaran untuk keseluruhan program baik program Utama dan program Pendukung (rutin) adalah :

Program	Anggaran (Rp.)	Sumber Dana (APBD)
1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	3.499.999.860	APBD
2. Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	51.076.467.277	APBD
3. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	18.250.869.273	APBD
4. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	24.074.454.129	APBD
5. Program penelitian dan Pengembangan Daerah	3.500.000.000	APBD
Jumlah Total Anggaran program (Utama & Rutin)	100.401.790.539	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja (LKj) Bappeda Provinsi Papua Tahun 2023 merupakan rangkaian dari mekanisme perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja Bappeda yang diawali dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Tahun 2019-2023, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Tahun 2023. Seluruh tahapan tersebut dipertanggungjawabkan tingkat pencapaian target-target kinerjanya pada setiap akhir tahun anggaran maupun pada akhir periode RPJMD Provinsi Papua

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan jangka menengah Bappeda Provinsi Papua yang pada akhirnya bermuara pada pencapaian visi misi Pemerintah Provinsi Papua. Pada pembahasan pengukuran kinerja atas kebijakan, program maupun kegiatan dilakukan dengan membandingkan rencana dengan realisasinya dari setiap indikator kinerja yang ditetapkan. Pengukuran kinerja diuraikan melalui pengukuran pencapaian sasaran.

3.1. Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Papua

Pengukuran Indikator Kinerja Utama pemerintah Provinsi Papua Periode 2019-2023 diambil dari Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Tahun 2019-2023. Pemerintah Provinsi Papua memiliki 5 misi dan 33 formulasi indikator kinerja utama. Bappeda Provinsi Papua bertanggungjawab pada Misi ke 3 yaitu Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Misi ke 4 yaitu Penguatan dan Percepatan Perekonomian Daerah sesuai potensi unggul lokal dan pengembangan wilayah berbasis kultural dan berkelanjutan. Tiga indikator Utama menjadi tanggungjawab Bappeda dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan Provinsi Papua.

Tabel 3.1
Formulasi Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (Formulasi Pengukuran, Tipe Perhitungan, Sumber data Alasan)
Misi 3 : Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/Tidak
		Penjabaran konsistensi Program RKPD kedalam APBD	$\frac{\text{Jumlah program APBD Tahun berkenan sesuai RKPD}}{\text{Jumlah Program APBD yang harus dilaksanakan tahun berkenan}} \times 100\%$
Misi 4 : Penguatan Dan Percepatan Perekonomian Daerah Sesuai Potensi Unggulan Lokal Dan Pengembangan Wilayah Berbasis Kultural Dan Berkelanjutan			
2.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Daya saing daerah	Pertumbuhan Ekonomi (Pertumbuhan PDRB)	$\frac{\text{PDRB}(t+1) - \text{PDRB}(t)}{\text{PDRB}(t)} \times 100\%$
		Laju Inflasi	Dimana : t+1 = tahun pengamatan PDRB t = tahun pengamatan PDRB sebelumnya $[\{(1 + \Delta \text{Inf}1)(1 + \Delta \text{Inf}2)(1 + \Delta \text{Inf}t)\} 1/t] - 1$ Dimana : ΔInf = perubahan inflasi dari nilai tahun sebelumnya t = adalah periode pengamatan perubahan nilai inflasi.
		PDRB Per kapital	$\frac{\text{PDRB}}{\text{Penduduk Pertengahan tahun}}$

Tabel 3.2
Realisasi Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Misi 3 : Penguatan Tata Kelola Pemerintahan					
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	1 Dok	1 Dok	100%
		Penjabaran konsistensi Program RPJMD kedalam RKPMD	100 %	85%	84,2%
		Penjabaran konsistensi Program RKPD kedalam APBD	100%	100%	100%
Misi 4 : Penguatan Dan Percepatan Perekonomian Daerah Sesuai Potensi Unggulan Lokal Dan Pengembangan Wilayah Berbasis Kultural Dan Berkelanjutan					
2.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Daya saing daerah	Pertumbuhan Ekonomi (Pertumbuhan PDRB)	5,91	5,22	88,32%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		Laju Inflasi	2,34	1,65	70,51
		PDRB Per kapital	45,35	47,65	105,07

3.2. Hasil Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023

Indikator kinerja merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, karakteristik indikator kinerja Bappeda bersifat positif, yaitu semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik. Untuk skala pengukuran kinerja dan predikatnya adalah sebagai berikut :

- Capaian kinerja >95% - 100% = Sangat Berhasil
- Capaian kinerja >80% - 95% = Berhasil
- Capaian kinerja >50% - 80% = Cukup Berhasil
- Capai Capaian < 50% = Kurang Berhasil

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran. Perumusan indikator kinerja sasaran lebih difokuskan pada indikator kinerja makro serta indikator kinerja strategis.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 telah ditetapkan sasaran strategis yang akan dicapai serta telah ditetapkan target kinerja sesuai dengan indikator kinerja pada sasaran strategis. Adapun hasil pencapaian target kinerja pada sasaran strategis Bappeda Provinsi Papua untuk tahun 2023 terdapat pada tabel berikut ini:

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel. 3.3 Capaian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Penjabaran konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100%	98%	98%
		Penjabaran konsistensi Program RKPD kedalam APBD	100%	95%	95%
2.	Meningkanya Kualitas Penyediaan Data Pembangunan Daerah	Ketersediaan data pembangunan daerah	100%	85%	85%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
3.	Meningkatnya Pengendalian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Prosentase SKPD dalam Penyerapan dan Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan	100%	100%	100%
4.	Implementasi Tata Ruang Secara Konsisten	Prosentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Perda RTRW	87%	85%	97%
5.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Predikat Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	75%	80%	80%

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa secara keseluruhan realisasi kinerja Bappeda Provinsi Papua dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 belum mencapai target dari 5 (lima) sasaran yang terdiri dari 6 (enam) indikator. Indikator sasaran pertama yaitu Persentase Penjabaran konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD teralisasi sebesar 100 persen bila dibandingkan dengan target capaian kinerja belum mencapai target. Terjadi pemutakhiran data program kegiatan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan, telah terjadi perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan ke dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang di ubah lagi ke dalam Kepmendagri 900.1.15-5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penjabaran konsistensi Program RKPD kedalam APBD menunjukkan capaian 98%, Penjabaran konsistensi Program RKPD kedalam APBD mencapai 95% menunjukkan capaian kinerja dibawah 100% dan 95%, Sasaran Meningkatnya Kualitas Penyediaan Data Pembangunan Daerah dengan indikator Ketersediaan data pembangunan daerah menunjukkan capaian 85%, Sasaran Meningkatnya Pengendalian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan indikator Prosentase SKPD dalam Penyerapan dan Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan mencapai 85% dengan capaian 97%, sasaran Implementasi Tata Ruang

Secara Konsisten realisasi mencapai 75% dengan capaian 80%, sedangkan Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Predikat Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah mencapai 80% dengan capaian 80%

Perhitungan persentase pencapaian target kinerja menggunakan cara semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Penerapan rumus digunakan untuk menghitung persentase capaian pada seluruh indikator. Tingkat pencapaian ini menunjukkan pelaksanaan urusan yang terkait dicapai melalui dukungan penganggaran dan kerja keras seluruh stakeholder dalam mendukung capaian sejumlah indikator tersebut

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan 2023

Pencapaian kinerja tahun 2023 merupakan bagian dari kinerja strategis Bappeda sebagaimana yang tercantum pada Renstra 2019-2023. Pencapaian kinerja tahun pertama Renstra dibandingkan dengan capaian kinerja tahun kedua Renstra untuk mengetahui kinerja Bappeda meningkat atau menurun dari tahun sebelumnya, dapat dilihat pada tabel perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2022 dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target		Realisasi	
			2022	2023	2022	2023
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Penjabaran konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	90%	100%	89%	98%
		Penjabaran konsistensi Program RKPD kedalam APBD	90%	100%	90%	95%

2.	Meningkanya Kualitas Penyediaan Data Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan data pembangunan daerah	90%	100%	85%	85%
3.	Meningkatnya Pengendalian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Prosentase SKPD dalam Penyerapan dan Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan	80%	100%	75%	100%
4.	Implementasi Tata Ruang Secara Konsisten	Prosentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Perda RTRW	75%	87%	70%	85%
5.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Predikat Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	85%	75%	70%	80%

Berdasarkan tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2023, Pencapaian sasaran indikator penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD pada tahun 2022 realisasi sebesar 90% sedangkan pada tahun 2023 realisasi sebesar 100%. Indikator Penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD pada tahun 2022 realisasi sebesar 90% sedangkan tahun 2023 realisasi sebesar 95%. Indikator sasaran 1 tidak mencapai 100% karena masih terdapat beberapa program yang belum selaras/konsisten antara RPJMD dengan RKPD. Indikator Persentase Ketersediaan data pembangunan daerah pada tahun 2022 realisasi sebesar 85% kurang dari target sedangkan tahun 2023 realisasi sebesar 85%, jika dilihat mengalami peningkatan tetapi kurang dari target yang telah ditetapkan, hal ini menunjukkan bahwa ada data yang belum tersedia dan belum update. Indikator persentase SKPD dalam Penyerapan dan Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan pada tahun 2022 realisasi mencapai 75% sedangkan tahun 2023 realisasi sebesar 100%, perbandingan realisasi masih sama dengan tahun sebelumnya, Indikator persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan PERDA RTRW, perbandingan realisasi tahun 2022 sebesar 70% sedangkan 2023 sebesar 85% hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan realisasi Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah pada tahun 2022 mendapat kategori “B” dengan capaian sebesar 70% sedangkan tahun target kinerja sebesar 80%

c. Perbandingan Capaian Tahun 2023 dan Target Restra Tahun 2019-2023

Persentase realisasi kinerja tahun 2023 dibandingkan dengan target tahunan jangka menengah dapat dilihat pada tabel 3.5 sebagai berikut:

Tabel, 3.5

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Target Renstra Tahun 2019-2023

Sasaran	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah (%)					Realisasi Capaian (%)					Persentase Capaian (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Penjabaran konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	80	85	90	95	100	80	80	75	80	98	100	94	98,9	84,2	98
		90	85	90	95	100	90	83	75	80	95	100	93	100	100	95
Meningkatnya Kualitas Penyediaan Data Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan data pembangunan daerah	85	85	90	95	100	-	80	85	90	85	90	94	94,4	95	85
Meningkatnya Pengendalian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Meningkatnya Pengendalian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah	80	80	85	90	100	90	75	75	80	100	113	81	95	95	100
Implementasi Tata Ruang Secara Konsisten	Prosentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Perda RTRW	-	70	75	-	87	-	68	70	-	85	-	97	93,3	-	97
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Predikat Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80	80	85	85	75	51	52	60	60	80	64	64.05	70	75	80

Berdasarkan Tabel 3.5. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Target Renstra Tahun 2019-2023 diketahui bahwa sasaran : (1) Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dengan indikator sasaran Penjabaran konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD menunjukkan rata-rata capaian sebesar 98 persen dan Penjabaran konsistensi Program RKPD kedalam APBD Sampai dengan tahun 2023 menunjukkan rata-rata capaian sebesar 95 persen, (2) Meningkatnya Kualitas Penyediaan Data Pembangunan Daerah dengan indikator sasaran Persentase Ketersediaan data pembangunan daerah menunjukkan rata-rata capaian sebesar 85 persen; (3) Meningkatnya Pengendalian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan daerah, dengan indikator Meningkatnya Pengendalian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah; menunjukkan rata-rata capaian sebesar 100 persen; (4) Implementasi Tata Ruang Secara Konsisten dengan indikator sasaran Prosentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Perda RTRW, menunjukkan rata-rata capaian sebesar 97 persen. Dari ke 4 sasaran diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan program kegiatan terkait sasaran tersebut pada kategori berhasil dalam memenuhi target RPJMD.

Sedangkan sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dengan indikator sasaran Predikat Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah menunjukkan rata-rata capaian sebesar 80 persen, namun berdasarkan penilaian hasil evaluasi atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua sampai dengan tahun 2023 capaian kinerja Bappeda masih dikategorikan “Baik”, dengan nilai angka sebesar 80 persen, hal ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas kinerja Bappeda sudah baik, memiliki system yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang telah dilakukan

Penyebab keberhasilan/kegagalan yang dihadapi selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Penyebab Keberhasilan:

1. Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA
2. Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA
3. Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA
4. Dukungan Sumber Daya Manusia yang berkomperen dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengendalian
5. Dukungan anggaran dan sarana prasarana yang memadai dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bappeda
6. Ketepatan perencanaan dan penetapan target serta ssaran pembangunan daerah secara menyeluruh
7. Ketersediaan data-data pendukung dalam menetapkan sasaran pembangunan daerah serta perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan

Penyebab Kegagalan:

1. Masih kurangnya kesadaran aparat pemda dalam menyusun dan menggunakan dokumen perencanaan untuk kebutuhan pembangunan daerah;
2. Belum tersedianya perdasai tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana;
3. Belum terciptanya keselarasan penyusunan rencana pembangunan daerah yang dilakukan dengan pendekatan Politik, Teknokrat, Partisipatif, Atas-bahwa (*Top Down*) dan bahwa-atas (*bottom up*) termasuk pendekatan budaya khas Papua;
4. Belum terciptanya keselarasan Perencanaan Pembangunan dengan amanat OTSUS mendorong Perlindungan, Keberpihakan dan Pemberdayaan Orang Asli papua;
5. Belum optimalnya penerapan perencanaan pembangunan partisipatif pada setiap tahapan dan jejang pemerintahan di Provinsi Papua;
6. Belum terciptanya Perencanaan dan Penganggaran Tahun Daerah maupun SKPD yang berbasisi kinerja;
7. Belum memadaninya data dasar pembangunan dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah;

8. Belum optimalnya Sinergi Perencanaan Pembangunan di Daerah baik secara vertikal maupun horizontal, termasuk antara Pemerintah dengan Mitra Pembangunan
9. Masih terlambatnya penyusunan rencana kerja pemerintah daerah dari kalender perencanaan secara nasional;
10. Terjadinya perubahan aturan yang menyebabkan tidak konsistensinya program kegiatan pada RPJMD ke dalam RKPD
11. Belum sinerginya dokumen-dokumen perencanaan, yakni antara RPJMD-RKPD, dan RKPD-RKA/DPA, serta keseluruhan dokumen perencanaan dengan RTRW Provinsi Papua;
12. Belum optimalnya kompetensi SDM, yang sesuai standar kebutuhan suatu unit kerja;
13. Masih adanya penempatan SDM di masing-masing bidang yang belum sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi pendidikan dan keahlian;
14. Sistem pengendalian dan evaluasi, serta penggunaan dan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi dan pengendalian belum sepenuhnya dijadikan sebagai input bagi kebutuhan perencanaan;

Alternatif Solusi yang telah dilakukan:

Langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi kendala dan hambatan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan koordinasi kebijakan perencanaan
2. Penyusunan rencana pembangunan
3. Pemantauan, evaluasi dan pengendalian perencanaan daerah
4. Penyediaan data yang up to date
5. Peningkatan SDM melalui pelatihan dan sosialisai terkait dokumen perencanaan

e. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisi program/kegiatan Bappeda Provinsi Papua Tahun 2023 yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yang dilaksanakan pada tahun 2023.

Tabel. 3.6
Program Kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian Kinerja Keuangan Tahun 2023

Kode Rekening	Nama Program	Capaian Kinerja	
		Fisik (%)	Keuangan (%)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1-03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1-03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	97,6	83,95
1-03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	97,6	83,58
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
5-01	PERENCANAAN		
5-01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	91,32	84,86
5-01.01.1.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	99,85	99,49
5-01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	99,94	55,6
5-01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	99	98,3
5-01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	99,69
5-01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98	96,97
5-01.01.1.09	Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	96	95,95
5-01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	100	98,14
5-01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	100	99,12
5-01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100	99,71
5-01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	99	96,26
5-01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	100	99,38
5-01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	99,66
5-01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100	98,61
5-01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	99,43
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	100	99,44

Kode Rekening	Nama Program	Capaian Kinerja	
		Fisik (%)	Keuangan (%)
	DAERAH		
5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100	99,82
5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	100	99,98
5.05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	99	97,45
5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	100	100
	Jumlah	95	80,71

Berdasarkan Tabel 3.6 terdapat 5 (Lima) program terdiri dari 17 (Tujuh belas) kegiatan dan 67 (Enam Puluh Tujuh) Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan kinerja keuangan tahun 2023

3.3. Realisasi Fisik Anggaran Tahun 2023

Capaian sasaran yang telah ditargetkan Bappeda Provinsi Papua Tahun 2023 tidak terlepas dari adanya dukungan dana yang telah dianggarkan dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Tahun 2023.

Tabel 3.7

Alokasi Anggaran dan Realisasi Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	%
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3.499.999.860,00	2.925.400.514,00	83,58
1-03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3.499.999.860,00	2.925.400.514,00	83,58
1-03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	3.499.999.860,00	2.925.400.514,00	83,58
1-03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	3.499.999.860,00	2.925.400.514,00	83,58
1-03.12.1.01.002	Pelaksanaan Persetujuan Substansi.Evaluasi dan Penetapan RRTR	3.499.999.860,00	2.925.400.514,00	83,58
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	96.901.790.679,00	77.551.600.886,66	80,03
5-01	PERENCANAAN	93.401.790.679,00	74.626.200.372,66	79,89
5-01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	51.076.467.277,00	32.788.309.396,66	64,19
5-01.01.1.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.080.875.000,00	1.075.334.715,00	99,49
5-01.01.1.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.000.000,00	99.390.270,00	99,39
5-01.01.1.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	50.000.000,00	49.050.000,00	98,10
5-01.01.1.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	45.875.000,00	45.871.100,00	99,99
5-01.01.1.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	50.000.000,00	49.900.000,00	99,80
5-01.01.1.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	50.000.000,00	49.845.000,00	99,69
5-01.01.1.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	107.500.000,00	1.075.334.715,00	99,49
5-01.01.1.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	677.500.000,00	673.915.345	99,47
5-01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	40.925.383.047,00	22.753.104.571,00	55,60
5-01.01.1.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	40.239.833.047,00	22.067.745.451,00	54,84
5-01.01.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	155.550.000,00	155.464.420,00	99,94
5-01.01.1.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	130.000.000,00	129.894.700,00	99,92
5-01.01.1.02.005	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
5-01.01.1.02.006	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
5-01.01.1.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
5-01.01.1.02.008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Pronogsis Realisasi Anggaran	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
5-01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	591.506.800,00	581.436.402,00	98,30
5-01.01.1.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	400.000.000,00	389.931.402,00	97,48
5-01.01.1.05.010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	191.506.800,00	191.505.000,00	100,00
5-01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.174.374.630,00	6.155.236.614,00	99,69
5-01.01.1.06.002	Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor	351.074.630,00	343.509.630,00	97,85
5-01.01.1.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	620.000.000,00	619.941.950,00	99,99
5-01.01.1.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	700.000.000,00	698.912.300,00	99,84
5-01.01.1.06.008	Fasilitas Kunjungan Tamu	1.000.000.000,00	999.735.333,00	99,97
5-01.01.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.755.000.000,00	2.753.652.281,00	99,95
5-01.01.1.06.011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	748.300.000,00	739.484.120,00	98,82
5-01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.189.496.400,00	1.153.463.000,00	96,97
5-01.01.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	73.200.000,00	73.200.000,00	100,00
5-01.01.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	102.000.000,00	66.000.000,00	64,71
5-01.01.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.014.296.400,00	1.014.263.000,00	100,00
5-01.01.1.09	Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	1.114.831.400,00	1.069.735.094,00	95,95
5-01.01.1.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	114.831.400,00	113.097.000,00	98,49

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	%
5-01.01.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.000.000.000,00	956.638.094,00	95,66
5-01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	18.250.869.273,00	17.911.492.628,00	98,14
5-01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	7.886.636.582,00	7.817.430.494,00	99,12
5-01.02.1.01.002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	1.002.000.000,00	996.402.013,00	99,44
5-01.02.1.01.003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	527.101.582,00	525.680.220,00	99,73
5-01.02.1.01.004	Koodinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	140.800.000,00	140.709.965,00	99,94
5-01.02.1.01.005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	4.344.360.000,00	4.299.234.696,00	98,96
5-01.02.1.01.006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	1.872.375.000,00	1.855.403600,00	99,09
5-01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	3.399.799.596,00	3.389.990.619,00	99,71
5-01.02.1.02.001	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1.537.866.566,00	1.529.940.142,00	99,48
5-01.02.1.02.002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	712.819.901,00	711.671.250,00	99,84
5-01.02.1.02.003	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1.149.113.120,00	1.148.379.227,00	99,94
5-01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	6.964.433.095,00	6.704.071.505,00	96,26
5-01.02.1.03.001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	3.394.347.040,00	3.320.835.025,00	97,83
5-01.02.1.03.002	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	499.990.000,00	487.331.970,00	97,47
5-01.02.1.03.003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	2.570.166.055,00	2.398.530.410,00	93,32
5-01.02.1.03.004	Fasilitasi /Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupten/Kota	499.930.000,00	497.374.110,00	99,49
5-01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	24.074.454.129,00	23.926.398.348,00	99,39
5-01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	10.299.999.500,00	10.264.572.257,00	99,66
5-01.03.1.01.001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4.500.000.000,00	4.499.969.352,00	100,00
5-01.03.1.01.002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	3.999.999.700,00	3.965.046.527,00	99,13
5-01.03.1.01.004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	500.000.000,00	499.942.580,00	99,99
5-01.03.1.01.005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	500.000.000,00	499.973.460,00	99,99
5-01.03.1.01.006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	299.999.800,00	299.936.390,00	99,98
5-01.03.1.01.008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan daerah Bidang Pembangunan Manusia	500.000.000	499.703.948,00	99,94
5-01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	4.199.764.572,00	4.141.565.027,00	98,61
5-01.03.1.02.001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	460.000.000,00	458.759.800,00	99,73
5-01.03.1.02.002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1.074.795.607,00	1.074.210.660,00	99,95
5-01.03.1.02.003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	500.000.000,00	446.242.660,00	89,25
5-01.03.1.02.004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	639.969.065,00	639.860.613,00	99,98
5-01.03.1.02.005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	425.000.000,00	424.654.090,00	99,92
5-01.03.1.02.006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	350.000.000,00	349.817.934,00	99,95
5-01.03.1.02.007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	250.000.000,00	248.179.990,00	99,27
5-01.03.1.02.008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	499.999.900,00	499.839.280,00	99,97
5-01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	9.574.690.057,00	9.520.261.064,00	99,43
5-01.03.1.03.001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	804.990.675,00	804.630.060,00	99,96

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	%
	Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
5-01.03.1.03.002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1.339.996.325,00	1.339.827.545	99,99
5-01.03.1.03.003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	999.999.325,00	999.970.901,00	100,00
5-01.03.1.03.004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1.129.899.515,00	1.129.578.581,00	99,97
5-01.03.1.03.005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	899.804.830,00	850.860.224,00	94,56
5-01.03.1.03.006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	299.999.735,00	299.272.750,00	99,76
5-01.03.1.03.007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	599.999.537,00	599.752.116,00	99,95
5-01.03.1.03.008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	3.499.999.800,00	3.496.395.887,00	99,90
5-05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3.500.000.000,00	3.499.999.800,00	100,00
5-05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	900.000.000,00	898.395.957,00	99,82
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	900.000.000,00	898.395.957,00	99,82
5-05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	950.000.000,00	949.776.004,00	100,00
5-05.02.1.02.001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	250.000.000,00	249.984.840,00	99,99
5-05.02.1.02.006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	700.000.000,00	699.791.164,00	99,97
5-05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	700.000.000,00	682.164.590,00	97,45
5-05.02.1.03.007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	700.000.000,00	682.164.590,00	97,45
5-05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	950.000.000,00	949.991.570,00	100,00
5-05.02.1.04.003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	950.000.000,00	949.991.570,00	100,00
	JUMLAH	100.401.790.539,00	81.031.929.007,66	80,71

Sumber : Bappeda 2023

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Bappeda Provinsi Papua Tahun 2023 memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan dan strategis instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan

Metode pengukuran capaian kinerja Bappeda Provinsi Papua tahun 2023 dilakukan berdasarkan analisa hasil kinerja kegiatan dengan membandingkan antara kinerja actual dengan rencana atau target/sasaran. Selanjutnya menginterpretasikan data yang diperoleh kemudian membuat pembobotan keberhasilan pencapaian dengan berpedoman pada program, kebijakan dan tujuan yang telah digariskan dari rincian pengukuran kinerja adalah evaluasi kinerja sasaran, evaluasi kinerja kegiatan dan indikator makro, maka capaian kinerja sasaran rata-rata Bappeda Provinsi Papua pada tahun 2023 secara keseluruhan dapat di kategorikan Sangat Berhasil, karena pencapaiannya 90 – 100% yang terdiri dari:

1. Indikator Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD mencapai 98% masuk dalam kategori sangat Berhasil hal ini perlu diperhatikan dalam penyusunan dokumen perencanaan.
2. Indikator Penjabaran Konsistensi program RKPD kedalam APBD mencapai 95% masuk dalam kategori Berhasil hal ini perlu diperhatikan juga dalam penyusunan dokumen perencanaan.
3. Indikator Ketersediaan data pembangunan mencapai 85% masih dalam kategori Berhasil, hal ini menunjukkan bahwa persentase data dan informasi perencanaan yang dibutuhkan tidak terbatas pada data yang tercantum dalam dokumen perencanaan, namun juga data-data yang digunakan di dalam dokumen penunjang lain.
4. Indikator Prosentase SKPD dalam penyerapan dan realialisasi pelaksanaan program dan kegiatan mencapai 100% masuk dalam kategori sangat Berhasil, dalam pelaksanaan program kegiatan perlu ditingkatkan kinerja sehingga penyerapan dapat mencapai target yang ditetapkan.

5. Indikator Prosentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Perda mencapai 85% sudah termasuk kategori berhasil hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan ruang sudah sesuai dengan Perda RTRW.
6. Indikator Peredikat Evaluasi Implementasi SAKIP perangkat Daerah mencapai 80%, masuk dalam kategori Berhasil.

Hal-hal yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

7. Belum terciptanya Perencanaan dan Penganggaran Tahunan Daerah maupun SKPD yang berbasisi kinerja.
8. Belum tersedianya perdasu tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana.
9. Belum terciptanya keselarasan Perencanaan Pembangunan dengan amanat OTSUS mendorong Perlindungan, Keberpihakan dan Pemberdayaan Orang Asli papua;
10. Belum optimalnya penerapan perencanaan pembangunan partisipatif pada setiap tahapan dan jejang pemerintahan di Provinsi Papua.

Upaya untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan kinerja sumber daya yang memadai yang mampu menjadi motivator dan dinamisator pembangunan daerah, ditandai dengan tersusunnya dokumen perencanaan daerah tepat waktu dan tepat sasaran.
2. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana dan jaringan (networking) perencanaan dan pemantauan yang memadai.
3. Optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
4. Peningkatan koordinasi antar institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dengan menyikapi secara arif dan cerdas pemberlakuan peraturan perundangan tentang perencanaan dan keuangan negara.
5. Peningkatan kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap mekanisme perencanaan dan kredibilitas institusi perencana.
6. Peningkatan kapasitas kelembagaan di tingkat SKPD dan Kabupaten/Kota dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas proses perencanaan.

7. Penguatan koordinasi perencanaan pembangunan antar SKPD, SKPD dengan Kabupaten/Kota guna mendukung terwujudnya perencanaan yang terintegrasi dan sinergis.
8. Peningkatan kapasitas SDM dan unit perencanaan pada SKPD.
9. Pembentukan aturan umum dan teknis perencanaan pembangunan daerah Provinsi Papua (mis: standard operating procedure (SOP)).
10. Peningkatan peralatan dan metode penilaian kelayakan dan penetapan skala prioritas kegiatan.
11. Peningkatan kualitas SDM perencana terhadap penguasaan keahlian (skill) fungsional perencanaan yang sesuai tugas pokok dan fungsi BAPPEDA.
12. Penguatan pengelolaan dan pemanfaatan data, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan.

Dengan laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai parameter untuk lebih memacu peningkatan kinerja aparatur Bappeda Provinsi Papua di tahun berikutnya.

Jayapura, 29 Januari 2024

KEPALA BAPPEDA PROVINSI PAPUA



YOHANES WALILO, S.Sos, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19700728 199712 1 001

LAPORAN KINERJA
PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN APBD PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2023
KEADAAN DESEMBER 2023

SKPD : 5-01.5-05.1-03.01.1000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KODE	BELANJA/JENIS PENGADAAN	LOKASI	PAGU DANA (RP)	TOLOK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI			SUMBER DANA	KET	
						KEUANGAN (Rp.)	KINERJA (%)	KINERJA (%)			
											7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5-01.5-05.1-03.01.1000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		100.401.790.539			81.031.929.008	80,71				
1.03.012	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		3.499.999.860			2.925.400.514	83,58				
1.03.012.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi		3.499.999.860			2.925.400.514	83,58				
1.03.012.1.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi		3.499.999.860	Jumlah RANPERDA RTRWP Papua yang mendapatkan Persetujuan Substansi dan Evaluasi serta Luas Kawasan Hutan yang diusulkan untuk Perubahan Kawasan Hutan	2 Dokumen	2.925.400.514	83,58	2 Dokumen	100	Pajak Asli Daerah	
5.01.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		51.076.467.277			32.788.309.397	64,19				
5.01.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1.080.875.000			1.075.334.715	99,49				
5.01.001.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		100.000.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	99.390.270	99,39	2 Dokumen	100	Pajak Asli Daerah	
5.01.001.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		50.000.000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	49.050.000	98,1	1 Dokumen	100	Pajak Asli Daerah	
5.01.001.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		45.875.000	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	45.871.100	99,99	1 Dokumen	100	Pajak Asli Daerah	
5.01.001.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		50.000.000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	49.900.000	99,8	1 Dokumen	100	Pajak Asli Daerah	
5.01.001.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		50.000.000	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	49.845.000	99,69	1 Dokumen	100	Pajak Asli Daerah	
5.01.001.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		107.500.000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	107.363.000	99,87	2 Dokumen	100	Pajak Asli Daerah	

KODE	BELANJA/JENIS PENGADAAN	LOKASI	PAGU DANA (RP)	TOLOK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				SUMBER DANA	KET
						KEUANGAN		KINERJA			
						(Rp.)	(%)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.01.001.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		677.500.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	673.915.345	99,47	1 Dokumen	100	Pajak Asli Daerah	
5.01.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		40.925.383.047			22.753.104.571	55,6				
5.01.001.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		40.239.833.047	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	180 orang/bulan	22.067.745.451	54,84	180 orang/bulan	100	Pajak Asli Daerah	
5.01.001.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		155.550.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	155.464.420	99,94	1 Dokumen	100	Pajak Asli Daerah	
5.01.001.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		130.000.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	129.894.700	99,92	1 Dokumen	100	Pajak Asli Daerah	
5.01.001.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		100.000.000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	100.000.000	100	1 Laporan	100	Pajak Asli Daerah	
5.01.001.1.02.06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan		100.000.000	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	100.000.000	100	1 Dokumen	100	Pajak Asli Daerah	
5.01.001.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		100.000.000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Dokumen	100.000.000	100	1 Dokumen	100	Pajak Asli Daerah	
5.01.001.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		100.000.000	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	100.000.000	100	1 Dokumen	100	Pajak Asli Daerah	
5.01.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		591.506.800			581.436.402	98,3				
5.01.001.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		400.000.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	389.931.402	97,48	8 Orang	100	Pajak Asli Daerah	
5.01.001.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		191.506.800	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	191.505.000	100	100 Orang	100	Pajak Asli Daerah	
5.01.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		6.174.374.630			6.155.235.614	99,69				
5.01.001.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		351.074.630	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	343.509.630	97,85	17 Paket	100	Pajak Asli Daerah	
5.01.001.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		620.000.000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	619.941.950	99,99	1 Paket	100	Pajak Asli Daerah	
5.01.001.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		700.000.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	698.912.300	99,84	1 Paket	100	Pajak Asli Daerah	
5.01.001.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu		1.000.000.000	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	999.735.333	99,97	1 Laporan	100	Pajak Asli Daerah	

KODE	BELANJA/JENIS PENGADAAN	LOKASI	PAGU DANA (RP)	TOLOK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				SUMBER DANA	KET
						KEUANGAN		KINERJA			
						(Rp.)	(%)		(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.01.001.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		2.755.000.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	2.753.652.281	99,95	1 Laporan	100	Pajak Asli Daerah	
5.01.001.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		748.300.000	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	739.484.120	98,82	1 Dokumen	100	Pajak Asli Daerah	
5.01.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.189.496.400			1.153.463.000	96,97				
5.01.001.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		73.200.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	73.200.000	100	1 Laporan	100	Pajak Asli Daerah	
5.01.001.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		102.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	66.000.000	64,71	1 Laporan	100	Pajak Asli Daerah	
5.01.001.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1.014.296.400	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.014.263.000	100	1 Laporan	100	Pajak Asli Daerah	
5.01.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.114.831.400			1.069.735.095	95,95				
5.01.001.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		114.831.400	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	113.097.000	98,49	10 Unit	100	Pajak Asli Daerah	
5.01.001.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1.000.000.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 Unit	956.638.095	95,66	18 Unit	100	Pajak Asli Daerah	
5.01.002	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		18.250.869.273			17.911.492.628	98,14				
5.01.002.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		7.886.636.582			7.817.430.494	99,12				
5.01.002.1.01.02	Koordinasi/Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya		1.002.000.000	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	996.402.013	99,44	1 Dokumen	100	Pajak Asli Daerah	
5.01.002.1.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik		527.101.582	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	525.680.220	99,73	1 Berita Acara	100	Pajak Asli Daerah	
5.01.002.1.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Peringkat Daerah/Lintas Peringkat Daerah		140.800.000	Jumlah Berita Acara Forum Peringkat Daerah/Lintas Peringkat Daerah	35 Berita Acara	140.709.965	99,94	35 Berita Acara	100	Pajak Asli Daerah	
5.01.002.1.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi		4.344.360.000	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	9 Berita Acara	4.299.234.696	98,96	9 Berita Acara	100	Pajak Asli Daerah	
5.01.002.1.01.06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi		1.872.375.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RP-IPD/RP-JMD/RKPD)	3 Dokumen	1.855.403.600	99,09	3 Dokumen	100	Pajak Asli Daerah	
5.01.002.1.02	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		3.399.799.596			3.389.990.619	99,71				

KODE	BELANJA/JENIS PENGADAAN	LOKASI	PAGU DANA (RP)	TOLOK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI			SUMBER DANA	KET	
						KEUANGAN (Rp.)	(%)	KINERJA			
								(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.01.002.1.02.01	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		1.537.866.566	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	1.529.940.142	99,48	1 Dokumen	100	Pajak Asli Daerah	
5.01.002.1.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah		712.819.910	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	23 Orang	711.671.250	99,84	23 Orang	100	Pajak Asli Daerah	
5.01.002.1.02.03	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		1.149.113.120	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	23 Orang	1.148.379.227	99,94	23 Orang	100	Pajak Asli Daerah	
5.01.002.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		6.964.433.095			6.704.071.515	96,26				
5.01.002.1.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jayapura (Kota)	3.394.347.040	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	3.320.835.025	97,83	4 Laporan	100	Pajak Asli Daerah	
5.01.002.1.03.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah		499.990.000	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan			2 Laporan	100		
5.01.002.1.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jayapura (Kota)	2.570.166.055	Jumlah Dokumen Laporan	2 Dokumen	487.331.970	97,47	2 Dokumen	100	Pajak Asli Daerah	
5.01.002.1.03.04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		499.930.000	Laporan Pemantauan dan Evaluasi	22 Dokumen	2.398.530.410	93,32	22 Dokumen	100	Pajak Asli Daerah	
5.01.003	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		24.074.454.129	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan			4 Laporan	100		
5.01.003.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		10.299.999.500	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	9 Dokumen	23.926.398.348	99,38	9 Dokumen	100		
5.01.003.1.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		4.500.000.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	4.499.969.352	100	3 Dokumen	100	Pajak Asli Daerah	
5.01.003.1.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		3.999.999.700	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	3.965.046.527	99,13	1 Laporan	100	Pajak Asli Daerah	
5.01.003.1.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		500.000.000	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	499.942.580	99,99	1 Laporan	100	Pajak Asli Daerah	

KODE	BELANJA/JENIS PENGADAAN	LOKASI	PAGU DANA (RP)	TOLOK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI			SUMBER DANA	KET	
						KEUANGAN		KINERJA			
						(Rp.)	(%)				(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.01.003.1.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		500.000.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	499.973.460	99,99	3 Dokumen	100	Pajak Asli Daerah	
5.01.003.1.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		299.999.800	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	299.936.390	99,98	1 Laporan	100	Pajak Asli Daerah	
5.01.003.1.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		500.000.000	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	499.703.948	99,94	1 Laporan	100	Pajak Asli Daerah	
5.01.003.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		4.199.764.572			4.141.565.027	98,61				
5.01.003.1.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		460.000.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	458.759.800	99,73	3 Dokumen	100	Pajak Asli Daerah	
5.01.003.1.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		1.074.795.607	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	1.074.210.660	99,95	1 Laporan	100	Pajak Asli Daerah	
5.01.003.1.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan		500.000.000	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	446.242.660	89,25	1 Laporan	100	Pajak Asli Daerah	
5.01.003.1.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		639.969.065	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	639.860.613	99,98	1 Laporan	100	Pajak Asli Daerah	
5.01.003.1.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		425.000.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	424.654.090	99,92	3 Dokumen	100	Pajak Asli Daerah	
5.01.003.1.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		350.000.000	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	349.817.934	99,95	1 Laporan	100	Pajak Asli Daerah	
5.01.003.1.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		250.000.000	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	248.179.990	99,27	1 Laporan	100	Pajak Asli Daerah	

KODE	BELANJA/JENIS PENGADAAN	LOKASI	PAGU DANA (RP)	TOLOK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI			SUMBER DANA	KET	
						KEUANGAN		KINERJA			
						(Rp.)	(%)				(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.01.003.1.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA		499.999.900	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDRPJMMD pada Bidang SDA	1 Laporan	499.839.280	99,97	1 Laporan	100	Pajak Asli Daerah	
5.01.003.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		9.574.690.057			9.520.261.064	99,43				
5.01.003.1.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)		804.990.675	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	3 Dokumen	804.630.060	99,96	3 Dokumen	100	Pajak Asli Daerah	
5.01.003.1.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		1.339.996.640	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1.339.827.545	99,99	1 Laporan	100	Pajak Asli Daerah	
5.01.003.1.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		999.999.325	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	999.970.901	100	1 Laporan	100	Pajak Asli Daerah	
5.01.003.1.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		1.129.899.515	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDRPJMMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1.129.578.581	99,97	1 Laporan	100	Pajak Asli Daerah	
5.01.003.1.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)		899.804.830	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	3 Dokumen	850.860.224	94,56	3 Dokumen	100	Pajak Asli Daerah	
5.01.003.1.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		299.999.735	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	299.272.750	99,76	1 Laporan	100	Pajak Asli Daerah	
5.01.003.1.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		599.999.537	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	599.725.116	99,95	1 Laporan	100	Pajak Asli Daerah	
5.01.003.1.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan		3.499.999.800	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDRPJMMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	3.496.395.887	99,9	1 Laporan	100	Pajak Asli Daerah	
5.05.002	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		3.500.000.000			3.480.328.121	99,44				

KODE	BELANJA/JENIS PENGADAAN	LOKASI	PAGU DANA (RP)	TOLOK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI			SUMBER DANA	KET	
						KEUANGAN		KINERJA			
						(Rp.)	(%)	(%)			(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.05.002.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		900.000.000			898.395.957	99,82				
5.05.002.1.01.03	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan		900.000.000	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Laporan	898.395.957	99,82	1 Laporan	100	Pajak Asli Daerah	
5.05.002.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		950.000.000			949.776.004	99,98				
5.05.002.1.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial		250.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek/Aspek Sosial	1 Dokumen	249.984.840	99,99	1 Dokumen	100	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	
5.05.002.1.02.06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan		700.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1 Dokumen	699.791.164	99,97	1 Dokumen	100	Pajak Asli Daerah	
5.05.002.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		700.000.000			682.164.590	97,45				
5.05.002.1.03.07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup		700.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	682.164.590	97,45	1 Dokumen	100	Pajak Asli Daerah	
5.05.002.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi		950.000.000			949.991.570	100				
5.05.002.1.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif		950.000.000	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	949.991.570	100	1 Laporan	100	Pajak Asli Daerah	
	JUMLAH		1.00.401.790.539			81.031.929.008	80,71			95,5	

Jayapura, 29 January 2024
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

YOHANES WALILO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP : 197007281997121001

**REKAPITULASI LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PELAKSANAAN APBD
BELANJA PER PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2023**

KEADAAN SAMPAI DENGAN : Desember 2023

SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI PAPUA

NO	BELANJA/JENIS PENGADAAN	LOKASI	VOLUME	PAGU DANA (RP)	BOBOT (%)	REAL KEUANGAN		TARGET FISIK (%)		REAL FISIK (%)		KETERANGAN
						(Rp.)	(%)	FISIK	TTB	FISIK	TTB	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.03.012	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			3.499.999.860	3,49	2.925.400.514	83,58	87,7	3,06	100	3,49	
1.03.012.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi			3.499.999.860	100	2.925.400.514	83,58	87,7	87,7	100	100	
1.03.012.1.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi			3.499.999.860	100	2.925.400.514	83,58	87,7	87,7	100	100	
5.01.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			51.076.467.277	50,87	32.788.309.397	64,19	91,86	46,73	99,94	50,84	
5.01.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.080.875.000	2,12	1.075.334.715	99,49	86,6	1,83	100	2,12	
5.01.001.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			100.000.000	9,25	99.390.270	99,39	100	9,25	100	9,25	
5.01.001.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			50.000.000	4,63	49.050.000	98,1	100	4,63	100	4,63	
5.01.001.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			45.875.000	4,24	45.871.100	99,99	100	4,24	100	4,24	
5.01.001.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			50.000.000	4,63	49.900.000	99,8	100	4,63	100	4,63	
5.01.001.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			50.000.000	4,63	49.845.000	99,69	94	4,35	100	4,63	
5.01.001.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			107.500.000	9,95	107.363.000	99,87	72,93	7,25	100	9,95	
5.01.001.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			677.500.000	62,68	673.915.345	99,47	83,36	52,25	100	62,68	
5.01.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			40.925.383.047	80,13	22.753.104.571	55,6	91,69	73,47	100	80,13	
5.01.001.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			40.239.833.047	98,32	22.067.745.451	54,84	91,57	90,03	100	98,32	
5.01.001.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			155.550.000	0,38	155.464.420	99,94	100	0,38	100	0,38	
5.01.001.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			130.000.000	0,32	129.894.700	99,92	100	0,32	100	0,32	
5.01.001.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			100.000.000	0,24	100.000.000	100	100	0,24	100	0,24	
5.01.001.1.02.06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan			100.000.000	0,24	100.000.000	100	100	0,24	100	0,24	
5.01.001.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			100.000.000	0,24	100.000.000	100	100	0,24	100	0,24	

NO	BELANJA/JENIS PENGADAAN	LOKASI	VOLUME	PAGU DANA (Rp)	BOBOT (%)	REAL KEUANGAN		TARGET FISIK (%)			REAL FISIK (%)		KETERANGAN
						(Rp.)	(%)	FISIK	TTB	FISIK	TTB		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
5.01.001.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			100.000.000	0,24		100	94	0,23	100	0,24		
5.01.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			591.506.800	1,16		98,3	95,14	1,1	100	1,16		
5.01.001.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			389.931.402	67,62		97,48	92,81	62,76	100	67,62		
5.01.001.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			191.506.800	32,38		100	100	32,38	100	32,38		
5.01.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			6.174.374.630	12,09		99,69	95,5	11,54	99,95	12,08		
5.01.001.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			351.074.630	5,69		97,85	100	5,69	100	5,69		
5.01.001.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			620.000.000	10,04		99,99	91,94	9,23	100	10,04		
5.01.001.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			700.000.000	11,34		99,84	88,57	10,04	99,57	11,29		
5.01.001.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			1.000.000.000	16,2		99,97	100	16,2	100	16,2		
5.01.001.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2.753.000.000	44,62		99,95	94,63	42,22	100	44,62		
5.01.001.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			748.300.000	12,12		98,82	100	12,12	100	12,12		
5.01.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.189.496.400	2,33		96,97	80,17	1,87	97,73	2,28		
5.01.001.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			73.200.000	6,15		100	50	3,08	100	6,15		
5.01.001.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			102.000.000	8,58		64,71	67,65	5,8	73,53	6,31		
5.01.001.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.014.296.400	85,27		100	83,6	71,29	100	85,27		
5.01.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.114.831.400	2,18		95,95	93,42	2,04	100	2,18		
5.01.001.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			114.831.400	10,3		98,49	36,12	3,72	100	10,3		
5.01.001.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1.000.000.000	89,7		95,66	100	89,7	100	89,7		
5.01.002	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			18.250.869.273	18,18		98,14	58,03	10,55	83,56	15,19		
5.01.002.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			7.886.636.582	43,21		99,12	91,85	39,69	99,4	42,95		
5.01.002.1.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya			1.002.000.000	12,7		99,44	74,9	9,52	100	12,7		
5.01.002.1.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik			527.101.582	6,68		99,73	65,8	4,4	100	6,68		
5.01.002.1.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah			140.800.000	1,79		99,94	100	1,79	100	1,79		
5.01.002.1.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi			4.344.360.000	55,09		98,96	95,22	52,45	100	55,09		

NO	BELANJA/JENIS PENGADAAN	LOKASI	VOLUME	PAGU DANA (RP)	BOBOT (%)	REAL KEUANGAN		TARGET FISIK (%)		REAL FISIK (%)		KETERANGAN
						(Rp.)	(%)	FISIK	TTB	FISIK	TTB	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.01.002.1.01.06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi			1.872.375.000	23,74		99,09	99,84	23,7	97,47	23,14	
5.01.002.1.02	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah			3.389.799.596	18,63		99,71	59,89	11,16	40,2	7,49	
5.01.002.1.02.01	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			1.537.866.566	45,23		99,48	81,33	36,79	64,78	29,3	
5.01.002.1.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah			712.819.910	20,97		99,84	65,42	13,72	26,94	5,65	
5.01.002.1.02.03	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			1.149.113.120	33,8		99,94	27,76	9,38	15,53	5,25	
5.01.002.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			6.964.433.095	38,16		96,26	18,81	7,18	86,78	33,12	
5.01.002.1.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jayapura (Kota)		3.394.347.040	48,74		97,83	13,82	6,74	100	48,74	
5.01.002.1.03.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah			499.990.000	7,18		97,47	37,23	2,67	98,69	7,09	
5.01.002.1.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jayapura (Kota)		2.570.166.055	36,9		93,32	10,85	4	64,54	23,82	
5.01.002.1.03.04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			499.930.000	7,18		99,49	75,21	5,4	99,49	7,14	
5.01.003	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			24.074.454.129	23,98		99,38	65,42	15,69	66,85	16,03	
5.01.003.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			10.299.999.500	42,78		99,66	56,82	24,31	56,82	24,31	
5.01.003.1.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			4.500.000.000	43,69		100	34,44	15,05	34,44	15,05	
5.01.003.1.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			3.999.999.700	38,84		99,13	62,57	24,3	62,69	24,35	
5.01.003.1.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan			500.000.000	4,85		99,99	100	4,85	100	4,85	
5.01.003.1.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			500.000.000	4,85		99,99	100	4,85	100	4,85	
5.01.003.1.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			299.999.800	2,91		99,98	100	2,91	98,19	2,86	
5.01.003.1.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia			500.000.000	4,85		99,94	100	4,85	100	4,85	
5.01.003.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			4.199.764.572	17,44		98,61	100	17,44	100	17,44	
5.01.003.1.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			460.000.000	10,95		99,73	100	10,95	100	10,95	
5.01.003.1.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			1.074.795.607	25,59		99,95	100	25,59	100	25,59	
5.01.003.1.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan			500.000.000	11,91		89,25	100	11,91	100	11,91	

NO	BELANJA/JENIS PENGADAAN	LOKASI	VOLUME	PAGU DANA (RP)	BOBOT (%)	REAL KEUANGAN		TARGET FISIK (%)		REAL FISIK (%)		KETERANGAN
						(Rp.)	(%)	FISIK	TTB	FISIK	TTB	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.01.003.1.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan			639.969.065	15,24		99,98	100	15,24	100	15,24	
5.01.003.1.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			425.000.000	10,12		99,92	100	10,12	100	10,12	
5.01.003.1.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA			350.000.000	8,33		99,95	100	8,33	100	8,33	
5.01.003.1.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA			250.000.000	5,95		99,27	100	5,95	100	5,95	
5.01.003.1.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA			499.999.900	11,91		99,97	100	11,91	100	11,91	
5.01.003.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			9.574.690.057	39,77		99,43	59,5	23,66	63,1	25,1	
5.01.003.1.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			804.990.675	8,41		99,96	69,84	5,87	100	8,41	
5.01.003.1.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			1.339.996.640	14		99,99	81,1	11,35	81,69	11,43	
5.01.003.1.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			999.999.325	10,44		100	77,06	8,05	100	10,44	
5.01.003.1.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur			1.129.899.515	11,8		99,97	4,05	0,48	5,63	0,66	
5.01.003.1.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			899.804.830	9,4		94,56	99,96	9,39	100	9,4	
5.01.003.1.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			299.999.735	3,13		99,76	100	3,13	93,53	2,93	
5.01.003.1.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			599.999.537	6,27		99,95	100	6,27	65,89	4,13	
5.01.003.1.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan			3.499.999.800	36,55		99,9	40,91	14,96	42,94	15,7	
5.05.002	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			3.500.000.000	3,49		99,44	65,54	2,28	37,18	1,3	
5.05.002.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			900.000.000	25,71		99,82	74,01	19,03	51,91	13,35	
5.05.002.1.01.03	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan			900.000.000	100		99,82	74,01	74,01	51,91	51,91	
5.05.002.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan			950.000.000	27,14		99,98	91,19	24,75	56,26	15,27	
5.05.002.1.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial			250.000.000	26,32		99,99	100	26,32	100	26,32	
5.05.002.1.02.06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan			700.000.000	73,68		99,97	88,04	64,87	40,64	29,95	
5.05.002.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			700.000.000	20		97,45	98,95	19,79	33,96	6,79	
5.05.002.1.03.07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup			700.000.000	100		97,45	98,95	98,95	33,96	33,96	
5.05.002.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi			949.991.570	27,14		100	7,24	1,96	6,49	1,76	

NO	BELANJA/JENIS PENGADAAN	LOKASI	VOLUME	PAGU DANA (RP)	BOBOT (%)	REAL KEUANGAN		TARGET FISIK (%)		REAL FISIK (%)		KETERANGAN
						(Rp.)	(%)	FISIK	TTB	FISIK	TTB	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.05.002.1.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif			950.000.000	100	949.991.570	100	7,24	7,24	6,49	6,49	
	JUMLAH			100.401.790.539	100	81.031.929.008	80,71	78,3	78,3	86,84	86,84	

Jayapura, 29 January 2024

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



YOHANES WALILO, S.Sos, M.Si
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP : 197007281997121001

**REKAPITULASI REALISASI PELAKSANAAN APBD PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DISUSUN PER JENIS BELANJA TAHUN ANGGARAN 2023**

KEADAAN : Desember 2023

NO	KODE	JENIS BELANJA	JUMLAH DPA	JUMLAH SUB KEGIATAN	PAGU DANA	REALISASI			KETERANGAN
						KEUANGAN		FISIK (%)	
						(Rp.)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5.1	BELANJA OPERASI	1	66	100.050.715.909	80.688.419.378	80,65	86,8	
	5.1.1	Belanja Pegawai	1	2	41.085.929.047	22.913.841.451	55,77	100	
	5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1	65	58.964.786.862	57.774.577.927	97,98	77,6	
	5.2	BELANJA MODAL	1	1	351.074.630	343.509.630	97,85	100	
		JUMLAH	1	67	100.401.790.539	81.031.929.008	80,71	86,84	

Jayapura, 29 January 2024

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

YOHANES WALILO, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP : 197007281997121001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI PAPUA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **YOHANES WALILO, S.Sos, M.Si**
Jabatan : **KEPALA BAPPEDA PROVINSI PAPUA**
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **DR. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE, MM**
Jabatan : **Pih. GUBERNUR PAPUA**
Selaku atas **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Jayapura, Februari 2023

PIHAK KEDUA
Pih. Gubernur Papua

DR. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE, MM

PIHAK PERTAMA
Kepala Bappeda Provinsi Papua


YOHANES WALILO, S.Sos, M.S
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19700728 199712 1 001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA ESELON II TAHUN 2023
BAPPEDA PROVINSI PAPUA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran	Rencana Aksi
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program, serta kegiatan Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsisten Program RPJMD kedalam RKPD	95%	Program Perencanaan pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	4,723,136,582	Triwulan I-IV
			95%	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	12,674,792,895	Triwulan I-IV
		Penjabaran Konsisten Program RPJMD kedalam RKPD	95%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	295,875,000	Triwulan I-IV
2	Meningkanya Kualitas Penyediaan Data Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan Data Pembangunan Daerah	95%	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2,999,999,796	Triwulan I-IV
3	Meningkatnya Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Prosentase SKPD dalam Penyerapan dan Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan	95%	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	3,499,883,095	Triwulan I-IV
4	Inplementasi Tata Ruang secara Konsisten	Presentasi Pemanfaatan Ruang yang Sesuai Dengan PERDA RTRW	75%	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	699,999,733	Triwulan I-IV
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Predikat Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	785.000.000	Triwulan I-IV
Total Anggaran Indikator Sasaran Strategis					25,678.687,101	

Total Anggaran untuk keseluruhan program baik Program indikator Kinerja Utama (IKU) dan Program Pendukung (Rutin) adalah :

No	Program	Anggaran	Rencana Aksi
A.	Program Indikator Kinerja Utama (IKU)	25.678.687.101	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	20.037.598.184	Triwulan I - IV
2.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.000.000.000	Triwulan I - IV
B.	Total Anggaran Program Pendukung dan Program IKU	48.716.285.285	

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
A. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rp 699,999,733	
I. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rincian Tata Ruang Provinsi	Rp 699,999,733	
1. Pelaksanaan Persetujuan Subtansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	Rp 699,999,733	DBH
B. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Rp 21,118,473,184	
I. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 1,080,875,000	
2 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 100,000,000	DBH
3 koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 50,000,000	DBH
4 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 45,875,000	DBH
5 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 50,000,000	DBH
6 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp 50,000,000	DBH
7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Perangkat Daerah	Rp 107,500,000	DBH
8 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 677,500,000	DBH
II. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 16,401,840,984	
9 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 15,716,290,984	DBH
10 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 155,550,000	DBH
11 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 130,000,000	
12 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 100,000,000	DBH
13 Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksa	Rp 100,000,000	DBH
14 koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Rp 100,000,000	DBH
15 Penyusunan laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp 100,000,000	DBH
III. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 241,506,800	
16 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 50,000,000	DBH
17 Sosialisai Peraturan Perundang-Undangan	Rp 191,506,800	DBH
IV. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 2,936,300,000	
18 Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Rp 153,000,000	DBH
19 Penyediaan Bahan logistik Kantor	Rp 120,000,000	DBH
20 Penyediaan Bahan Cetak dan Pengandaan	Rp 300,000,000	DBH
21 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 460,000,000	DBH
22 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Rp 1,255,000,000	DBH
23 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp 648,300,000	DBH

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
V.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 343,400,400	
24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 73,200,000	DBH
25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 102,000,000	DBH
26	Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor	Rp 168,200,400	DBH
VI.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 114,550,000	
27	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 114,550,000	DBH
C.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIANDAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rp 11,223,019,473	
I.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rp 4,723,136,582	
28	Koordinasi Penelahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Rp 442,000,000	DBH
29	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Rp 527,101,582	DBH
30	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/lintas SKPD	Rp 140,800,000	DBH
31	Pelaksanaan Musrebang Provinsi	Rp 2,848,360,000	DBH
32	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Rp 764,875,000	DBH
II.	Analisis Data dan Informasi Pemerintaha Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 2,999,999,796	
33	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 1,387,566,566	DBH
34	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 610,469,910	DBH
35	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informas Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten/Kota	Rp 1,001,963,320	DBH
III.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 3,499,883,095	
36	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Rp 999,997,040	DBH
37	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Rp 499,990,000	DBH
38	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp 1,499,966,055	DBH
39	fasilitasi /Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 499,930,000	DBH
D.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp 12,674,792,895	
I.	Koordiansi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembanguan Manusia	Rp 3,499,999,600	
40	koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp 700,000,000	DBH

	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
41	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Rp	999,999,800	DBH
42	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Rp	500,000,000	DBH
43	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Rp	500,000,000	DBH
44	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp	299,999,800	DBH
45	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp	500,000,000	DBH
II.	<i>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</i>	Rp	3,399,999,900	
46	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp	460,000,000	DBH
47	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Rp	575,000,000	DBH
48	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Rp	500,000,000	DBH
49	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Rp	340,000,000	DBH
50	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJP, RPJMD, dan RKPD)	Rp	425,000,000	DBH
51	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Rp	350,000,000	DBH
52	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Rp	250,000,000	DBH
53	koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Rp	499,999,900	DBH
III.	<i>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan kewilayahan</i>	Rp	5,774,793,395	
54	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp	804,990,675	DBH
55	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Rp	839,999,685	DBH
56	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Rp	999,999,325	DBH

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
57	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Rp 829,999,515	DBH
58	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJP, RPJMD, dan RKPD)	Rp 799,804,705	DBH
59	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang Kewilayahan	Rp 299,999,735	DBH
60	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Rp 599,999,855	DBH
61	koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Rp 599,999,900	DBH
D.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rp 3,000,000,000	
I.	<i>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Pengaturan</i>	<i>Rp 900,000,000</i>	
62	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Rp 900,000,000	DBH
II.	<i>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</i>	<i>Rp 700,000,000</i>	
63	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Rp 700,000,000	DBH
III.	<i>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</i>	<i>Rp 700,000,000</i>	
64	Penelitian dan Pengembangan Lingkuagn Hidup	Rp 700,000,000	DBH
IV.	<i>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</i>	<i>Rp 700,000,000</i>	
65	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Bersifat Inovasi	Rp 700,000,000	DBH
Jumlah Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Utama/Rutin)		Rp. 48.716.285.285	

Jayapura, Februari 2023

PIHAK KEDUA
Plh. Gubernur Papua

DR. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE, MM

PIHAK PERTAMA
Kepala Bappeda Provinsi Papua



YOHANES WALILO, S.Sos, M.S
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19700728 199712 1 001



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **VERRA A.P. WANDA, ST, M.Si**
Jabatan : **SEKRETARIS BAPPEDA PROVINSI PAPUA**
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **YOHANES WALILO, S.Sos, M.Si**
Jabatan : **KEPALA BAPPEDA PROVINSI PAPUA**
Selaku atas **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Jayapura, Februari 2023

PIHAK KEDUA
Kepala Bappeda Provinsi Papua

YOHANES WALILO, S.Sos, M.S
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19700728 199712 1 001

PIHAK PERTAMA
Sekretaris Bappeda Provinsi Papua

VERRA A.P. WANDA, ST, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 19720123 199712 2 001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
TINGKAT ESELON III PERANGKAT DAERAH**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran	Rencana Aksi
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program, serta kegiatan Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsisten Program RPJMD kedalam RKPD	95%	Program Perencanaan pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	4,723,136,582	Triwulan I-IV
		Penjabaran Konsisten Program RPJMD kedalam RKPD	95%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	295,875,000	Triwulan I-IV
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Predikat Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	785.000.000	Triwulan I-IV
Total Anggaran Indikator Sasaran Strategis					5,804.011,582	

Total Anggaran untuk keseluruhan program baik Program indikator Kinerja Utama (IKU) dan Program Pendukung (Rutin) adalah :

No	Program	Anggaran	Rencana Aksi
A.	Program Indikator Kinerja Utama (IKU)	5,804.011,582	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	39.912.273.703	Triwulan I - IV
2.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.000.000.000	Triwulan I - IV
B.	Total Anggaran Program Pendukung dan Program IKU	48.716.285.285	

	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Rp 21,118,473,184	
<i>I.</i>	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Rp 1,080,875,000</i>	
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 100,000,000	DBH
3	koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 50,000,000	DBH
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 45,875,000	DBH
5	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 50,000,000	DBH
6	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp 50,000,000	DBH
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Perangkat Daerah	Rp 107,500,000	DBH
8	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 677,500,000	DBH
<i>II.</i>	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Rp 16,401,840,984</i>	

	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
9	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	15,716,290,984	DBH
10	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp	155,550,000	DBH
11	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp	130,000,000	
12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp	100,000,000	DBH
13	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksa	Rp	100,000,000	DBH
14	koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPd	Rp	100,000,000	DBH
15	Penyusunan laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp	100,000,000	DBH
III.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp	241,506,800	
16	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp	50,000,000	DBH
17	Sosialisai Peraturan Perundang-Undangan	Rp	191,506,800	DBH
IV.	Administrsi Umum Perangkat Daerah	Rp	2,936,300,000	
18	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Rp	153,000,000	DBH
19	Penyediaan Bahan logistik Kantor	Rp	120,000,000	DBH
20	Penyediaan Bahan Cetak dan Pengandaan	Rp	300,000,000	DBH
21	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp	460,000,000	DBH
22	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Rp	1,255,000,000	DBH
23	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp	648,300,000	DBH
V.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	343,400,400	
24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	73,200,000	DBH
25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	102,000,000	DBH
26	Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor	Rp	168,200,400	DBH
VI.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	114,550,000	
27	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	114,550,000	DBH
C.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIANDAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rp	11,223,019,473	
I.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rp	4,723,136,582	
28	Koordinasi Penelahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Rp	442,000,000	DBH
29	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Rp	527,101,582	DBH
30	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/lintas SKPD	Rp	140,800,000	DBH
31	Pelaksanaan Musrembang Provinsi	Rp	2,848,360,000	DBH
32	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Rp	764,875,000	DBH

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan

Anggaran

Keterangan

Jumlah Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Utama/Rutin)

Rp. 25.841.609.766

Jayapura, Februari 2023

PIHAK KEDUA

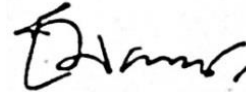
Kepala Bappeda Provinsi Papua



YOHANES WALILO, S.Sos, M.S
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19700728 199712 1 001

PIHAK PERTAMA

Sekretaris Bappeda Provinsi Papua



VERRA A.P. WANDA, ST, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 19720123 199712 2 001



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **SYAHRUDIN, SE, M.Si**
Jabatan : Plh. Kepala Bidang Perekonomian
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **YOHANES WALILO, S.Sos, M.Si**
Jabatan : KEPALA BAPPEDA PROVINSI PAPUA
Selaku atas **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Jayapura, Februari 2023

PIHAK KEDUA
Kepala Bappeda Provinsi Papua

YOHANES WALILO, S.Sos, M.S
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19700728 199712 1 001

PIHAK PERTAMA
Plh. Kepala Bidang Perekonomian

SYAHRUDIN, SE, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 19720123 199712 2 001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
TINGKAT ESELON III PERANGKAT DAERAH**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran	Rencana Aksi
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program, serta kegiatan Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsisten Program RPJMD kedalam RKPD	95%	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	3.399.999.900	Triwulan I-IV
Total Anggaran Indikator Sasaran Strategis					3.399.999.900	

	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
A.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp	3.399.999.900	
I.	<i>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</i>	Rp	<i>3,399,999,900</i>	
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp	460,000,000	DBH
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Rp	575,000,000	DBH
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Rp	500,000,000	DBH
4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Rp	340,000,000	DBH
5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJP, RPJMD, dan RKPD)	Rp	425,000,000	DBH
6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Rp	350,000,000	DBH
7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Rp	250,000,000	DBH
8	koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Rp	499,999,900	DBH
Jumlah Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rp.	48.716.285.285	

Jayapura, Februari 2023

PIHAK KEDUA
Kepala Bappeda Provinsi Papua



YOHANES WALILO, S.Sos, M.S
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19700728 199712 1 001

PIHAK PERTAMA
Plh. Kepala Bidang Perekonomian

SYAHRUDIN, SE, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 19720123 199712 2 001



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **JIMMY A.Y THESIA, S.Sos, M.Si**

Jabatan : Kepala Bidang Sosial Budaya

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **YOHANES WALILO, S.Sos, M.Si**

Jabatan : KEPALA BAPPEDA PROVINSI PAPUA

Selaku atas **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Jayapura, Februari 2023

PIHAK KEDUA
Kepala Bappeda Provinsi Papua

YOHANES WALILO, S.Sos, M.S
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19700728 199712 1 001

PIHAK PERTAMA
Kepala Bidang Sosial Budaya

JIMMY A.Y THESIA, S.Sos, M.Si
PEMBINA
NIP. 19770401 200112 1 004

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
TINGKAT ESELON III PERANGKAT DAERAH**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran	Rencana Aksi
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program, serta kegiatan Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsisten Program RPJMD kedalam RKPD	95%	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	3,499,999,600	Triwulan I-IV
Total Anggaran Indikator Sasaran Strategis					3,499,999,600	

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan				Anggaran	Ket.
A. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				Rp 3,499,999,600	
I. Koordiansi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				Rp 3,499,999,600	
1	koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			Rp 700,000,000	DBH
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan			Rp 999,999,800	DBH
3	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan			Rp 500,000,000	DBH
4	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)			Rp 500,000,000	DBH
5	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			Rp 299,999,800	DBH
6	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia			Rp 500,000,000	DBH
Jumlah Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Rp 3,499,999,600	

Jayapura, Februari 2023

PIHAK KEDUA
Kepala Bappeda Provinsi Papua


YOHANES WALILO, S.Sos, M.S
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19700728 199712 1 001

PIHAK PERTAMA
Kepala Bidang Sosial Budaya

JIMMY A.Y THESIA, S.Sos, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 19770401 200112 1 004



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **YULIEN WEYA, SH, M.Ap**
Jabatan : Kepala Bidang Fisik Prasarana
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **YOHANES WALILO, S.Sos, M.Si**
Jabatan : KEPALA BAPPEDA PROVINSI PAPUA
Selaku atas **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Jayapura, Februari 2023

PIHAK KEDUA
Kepala Bappeda Provinsi Papua


YOHANES WALILO, S.Sos, M.S
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19700728 199712 1 001

PIHAK PERTAMA
Kepala Bidang Fisik Prasarana


YULIEN WEYA, SH, M.Ap
PENATA TK I
NIP. 19831128 201004 1 001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
TINGKAT ESELON III PERANGKAT DAERAH**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran	Rencana Aksi
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program, serta kegiatan Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsisten Program RPJMD kedalam RKPD	95%	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	3,474,989,200	Triwulan I-IV
Total Anggaran Indikator Sasaran Strategis					3,474,989,200	

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan			Anggaran	Ket.
A	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Rp 3,474,989,200	
I	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrstruktur dan kewilayahan		Rp 3,474,989,200	
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrstruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Rp 804,990,675	DBH
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrstruktur		Rp 839,999,685	DBH
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembanguna Perangkat Daerah Bidang Infrstruktur		Rp 999,999,325	DBH
4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrstruktur		Rp 829,999,515	DBH

Jayapura, Februari 2023

PIHAK KEDUA
Kepala Bappeda Provinsi Papua

YOHANES WALILO, S.Sos, M.S
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19700728 199712 1 001

PIHAK PERTAMA
Kepala Bidang Fisik Prasarana

YULIEN WEYA, SH, M.Ap
PENATA TK I
NIP. 19831128 201004 1 001



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **EDISON HOWAY, SH, M.Hum**
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Wilayah
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **YOHANES WALILO, S.Sos, M.Si**
Jabatan : KEPALA BAPPEDA PROVINSI PAPUA
Selaku atas **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Jayapura, Februari 2023

PIHAK KEDUA
Kepala Bappeda Provinsi Papua

YOHANES WALILO, S.Sos, M.S
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19700728 199712 1 001

PIHAK PERTAMA
Kepala Bidang Perencanaan dan
Pengembangan Wilayah

EDISON HOWAY, SH, M.Hum
PEMBINA TK. I
NIP. 19660701 199610 1 001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
TINGKAT ESELON III PERANGKAT DAERAH**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran	Rencana Aksi
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program, serta kegiatan Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsisten Program RPJMD kedalam RKPD	95%	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2,299,804,195	Triwulan I-IV
4	Inplementasi Tata Ruang secara Konsisten	Presentasi Pemanfaatan Ruang yang Sesuai Dengan PERDA RTRW	75%	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	699,999,733	Triwulan I-IV
Total Anggaran Indikator Sasaran Strategis					2,999.803,928	

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan			Anggaran	Ket
A.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		Rp 699,999,733	
I.	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rincian Tata Ruang Provinsi		Rp 699,999,733	
	1.	Pelaksanaan Persetujuan Subtansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	Rp 699,999,733	DBH
B.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Rp 12,674,792,895	
I.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Rp 5,774,793,395	
	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJP, RPJMD, dan RKPD)	Rp 799,804,705	DBH
	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang Kewilayahan	Rp 299,999,735	DBH
	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Rp 599,999,855	DBH
	3	koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Rp 599,999,900	DBH
Jumlah Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Rp 2,999.803,928	

Jayapura, Februari 2023

PIHAK KEDUA
Kepala Bappeda Provinsi Papua



YOHANES WALILO, S.Sos, M.S
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19700728 199712 1 001

PIHAK PERTAMA
Kepala Bidang Perencanaan dan
Pengembangan Wilayah

EDISON HOWAY, SH, M.Hum
PEMBINA TK. I
NIP. 19660701 199610 1 001



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **ANDRY, S.IP, M.Si**
Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **YOHANES WALILO, S.Sos, M.Si**
Jabatan : KEPALA BAPPEDA PROVINSI PAPUA
Selaku atas **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Jayapura, Februari 2023

PIHAK KEDUA
Kepala Bappeda Provinsi Papua

YOHANES WALILO, S.Sos, M.S
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19700728 199712 1 001

PIHAK PERTAMA
Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi

ANDRY, S.IP, M.Si
PEMBINA
NIP. 19720123 199712 2 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
TINGKAT ESELON III PERANGKAT DAERAH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran	Rencana Aksi
1	Meningkatnya Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Prosentase SKPD dalam Penyerapan dan Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan	95%	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	3,499,883,095	Triwulan I-IV
Total Anggaran Indikator Sasaran Strategis					3,499,883,095	

	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
A.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIANDAN EVALUASIS PEMBANGUNAN DAERAH	Rp 3,499,883,095	
i.	<i>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	Rp 3,499,883,095	
1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Rp 999,997,040	DBH
2	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Rp 499,990,000	DBH
3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp 1,499,966,055	DBH
4	fasilitasi /Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 499,930,000	DBH
Jumlah Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rp. 3,499,883,095	

Jayapura, Februari 2023

PIHAK KEDUA
Kepala Bappeda Provinsi Papua



YOHANES WALILO, S.Sos, M.S
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19700728 199712 1 001

PIHAK PERTAMA
Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi



ANDRY, S.IP, M.Si
PEMBINA
NIP. 19720123 199712 2 001



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **Drs. YELELA Y. WITIPO, M.Si**
Jabatan : Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **YOHANES WALILO, S.Sos, M.Si**
Jabatan : KEPALA BAPPEDA PROVINSI PAPUA
Selaku atas **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Jayapura, Februari 2023

PIHAK KEDUA
Kepala Bappeda Provinsi Papua

YOHANES WALILO, S.Sos, M.S
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19700728 199712 1 001

PIHAK PERTAMA
Kepala Bidang Penelitian dan
Pengembangan

Drs. YELELA Y. WITIPO, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 19681204 198903 1 008

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
TINGKAT ESELON III PERANGKAT DAERAH

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
A. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rp 3,000,000,000	
I. <i>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Pengaturan</i>	Rp 900,000,000	
1 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Rp 900,000,000	DBH
II. <i>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</i>	Rp 700,000,000	
2 Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Rp 700,000,000	DBH
III. <i>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</i>	Rp 700,000,000	
3 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Rp 700,000,000	DBH
IV. <i>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</i>	Rp 700,000,000	
4 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Bersifat Inovasi	Rp 700,000,000	DBH
Jumlah Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rp. 3.000.000.000	

Jayapura, Februari 2023

PIHAK KEDUA
Kepala Bappeda Provinsi Papua



YOHANES WALILO,S.Sos, M.S
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19700728 199712 1 001

PIHAK PERTAMA
Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan

Drs. YELELA Y. WITIPO, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 19681204 198903 1 008



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **ROBECA P. MANSNANDIFU, S.Sos, MM**

Jabatan : Kepala UPTB Pusdalisbang

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **YOHANES WALILO, S.Sos, M.Si**

Jabatan : KEPALA BAPPEDA PROVINSI PAPUA

Selaku atas **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Jayapura, Februari 2023

PIHAK KEDUA
Kepala Bappeda Provinsi Papua

YOHANES WALILO, S.Sos, M.S
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19700728 199712 1 001

PIHAK PERTAMA
Kepala UPTB Pusdalisbang

ROBECA P. MANSNANDIFU, S.Sos, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19711030 199712 2 001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
TINGKAT ESELON III PERANGKAT DAERAH**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran	Rencana Aksi
1	Meningkanya Kualitas Penyediaan Data Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan Data Pembangunan Daerah	95%	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2,999,999,796	Triwulan I-IV
Total Anggaran Indikator Sasaran Strategis					2,999,999,796	

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
A.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIANDAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rp 2,999,999,796	
i.	<i>Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	Rp 2,999,999,796	
1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 1,387,566,566	DBH
2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 610,469,910	DBH
3	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten/Kota	Rp 1,001,963,320	DBH
Jumlah Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rp. 2,999,999,796	

Jayapura, Februari 2023

PIHAK KEDUA
Kepala Bappeda Provinsi Papua

YOHANES WALILO, S.Sos, M.S
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19700728 199712 1 001

PIHAK PERTAMA
Kepala UPTB PUSDALISBANG

ROBECA P. MANSNANDIFU, S.Sos, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19711030 199712 2 001